

Melacak Jejak Hari Jadi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta



Institute For Media and Social Studies **2022**
dan DPRD Kota Surakarta.



DAFTAR ISI

Pengantar	5
Insitute for Media and Social Studies	5
Ketua DPRD Kota Surakarta	7
Sekretaris DPRD Kota Surakarta	8
BAB I	
MELACAK JEJAK SEJARAH LEMBAGA WAKIL RAKYAT	
KOTA SURAKARTA	10
1.1. Kilas Balik Pembentukan DPR	10
1.2. Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)	11
1.3. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)	11
1.4. Pembubaran Secara Resmi Negara RIS Berbentuk Federasi	11
1.5. Pembubaran Secara Resmi Negara RIS	12
1.6. DPR Hasil Pemilu 20 Maret 1956 (1956-1959)	12
1.7. DPR Hasil Dekrit Presiden 1959 Berdasarkan UUD 1945 (1959-1965)	12
1.8. DPR Hasil Pemilu 20 Maret 1956 (1955-1959)	13
1.9. Masa DPR Gotong Royong Tanpa PKI (1965-1966)	13
1.10. Masa Orde Baru (1966-1999)	14
1.11. Masa Reformasi (1999-sekarang)	14
BAB II	
KILAS BALIK PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
KOTA SURAKARTA	16
2.12. Masa Revolusi dan Pembakaran Hominte	16
2.13. Dualisme Pemerintahan Kota Solodan Penyerbuan Belanda	19
2.14. Perjalanan Panjang Pembentukan DPRD Kota Surakarta	22
2.15. Riwayat Perjuangan dan Gegeran	22
2.16. Dualisme Pemerintahan	24

BAB III

PEMERINTAH DAERAH SURAKARTA PASCA KEMERDEKAAN & PEMBENTUKAN DPRD

SEBAGAI LEMBAGA WAKIL RAKYAT	32
1.17. Pemerintahan Surakarta Pasca Kemerdekaan	32
1.18. Pemerintahan Karisidenan Surakarta	35
1.19. Pemerintahan Tentara Rakyat	38
1.20. Dekrit Presiden Pembentukan TKR	38
1.21. Pergolakan Sosial Politik di Surakarta	40
1.22. Kondisi Menjelang Pemberontakan PKI Madion 1948	41
1.23. Daerah Surakarta Darurat Militer	43
1.24. Pembentukan Lembaga Wakil Rakyat Kota Besar Surakarta	46

BAB IV

PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPR & DPRD

DARI MASA KE MASA	48
1.25. Struktur Kelembagaan DPR dan DPRD	49
1.26. Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPR Periode 1955	49
1.27. Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRDS Periode 195-1955	51

DAFTAR DAFTAR LAMPIRAN

Nama Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004	
Struktur Kepemimpinan Anggota DPRD Kota Surakarta	
Nama-Nama Anggota Dewan di Dalam Komisi	
Photo Kegiatan DPRD	
Nama Anggota DPRD Hasil Pemilu 2009	
Struktur Kepemimpinan Anggota DPRD Kota Surakarta	
Nama Anggota Dewan di Dalam Komisi	
Photo Kegiatan DPRD	

Pengantar IMSS Insitute for Media and Social Studies

Melakukan pelacakan hari jadi lembaga perwakilan rakyat, DPRD Kota Surakarta, mau tidak mau perhatian kita mengacu pada sejarah masa lalu terkait dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), penetapan UUD Negara RI yang dikenal luas sebagai UUD 1945.

Sesuai aturan peralihan pada 29 Agustus 1945, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang beranggotakan 137 orang, yang kemudian diakui sebagai calon badan legislatif di Indonesia dan kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) Republik Indonesia.

Bila kemudian acuannya berpatok pada tanggal 29 Agustus 1945, apakah kemudian derivasi pembentukan badan legislatif di daerah juga akan mengekor pada hari jadi DPR. Rasanya sulit untuk menjadikan hari jadi DPR sebagai bentuk patokan dasar yang menurunkan hari ulang tahun dewan perwakilan di daerah-daerah mengekor.

Patokan lain yang hingga kini belum terungkap yaitu, apakah kemudian lembaga legislatif telah melakukan pembentukan DPRD di setiap provinsi kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Penelusuran tim peneliti Institute for Media and Social Studies (IMSS) ke berbagai kepustakaan pemerintah maupun lembaga lain penyedia informasi, tidak menemukan fatwa lembaga yudikatif membentuk derivat ke daerah.

Berdasar hal tersebut, tim peneliti melakukan semacam rekonstruksi dari berbagai informasi mengenai pembentukan awal lembaga legislatif, dewan perwakilan rakyat kota Solo. Bukan hal mudah ternyata. Tidak banyak anggota dewan yang berhasil diwawancarai mengetahui secara persis kapan lembaga DPRD Kota Solo berdiri.

Atas dasar hal tersebut tim peneliti menarik kesejarah ‘perpecahan’ -kalau boleh dikatakan demikian- pelimpahan sepihak keraton kasunanan menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Silang sengkabut pemindahan ‘kekuasaan’ dari kerajaan menjadi bagian NKRI menjadi titik pijak pelacakan HUT DPRD Kota Surakarta.

Selain itu, dalam buku hasil pelacakan hari jadi, IMSS memaparkan para anggota dewan yang pernah mengemban tugas sebagai wakil rakyat kota solo hasil pemilihan legeslatif tahun 2004, 2009 dan 2019. Tidak ada salahnya bila IMSS mengandeng lembaga wakil rakyat bergandengan tangan menelusuri jejak hari lahir DPRD Kota Surakarta. Setidaknya ujaran Bung Karno, agar kita jangan sekali-kali melupakan sejarah, jasmerah. Perlu selalu diingat.

Eddy J Soetopo, SSi., MSi
Direktur Eksekutif IMSS
Jurnalis senior

Pengantar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Setelah sekian lama berdiri lembaga wakil rakyat, DPRD Kota Surakarta tidak diketahui secara pasti sejak kapan berdiri. Bahkan tidak banyak warga masyarakat yang mengetahui peran, fungsi dan tugas para wakil rakyat di lembaga ini.

Untuk itulah kami memutuskan agar pelacakan jejak berdirinya lembaga dilakukan penelusuran oleh lembaga lain yang memiliki kapasitas sebagai peneliti sejarah masalah. Salah satu tujuan pelacakan hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta yakni menemukan benang merah keberadaan wakil rakyat dalam mengabdikan diri pada bangsa dan negara melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legeslatif.

Kami sangat menghargai pada tim, yang melibatkan mayoritas para jurnalis sepuh maupun muda usia, ikut bergabung melakukan pelacakan hari jadi DPRD Kota SURakarta. Disela-sela kesibukan masing-masing, tim yang bergabung dalam Institute for Media and Social Studies (IMSS) telah melakukan pengumpulan data, fakta dan mewawancarai nara-sumber yang mengetahui sejarah masalah. Tentu bukan suatu hal yang mudah dilakukan

Atas nama lembaga, kami mengucapkan terima kasih pada anggota tim dan sekretariat dewan yang terlibat dan berhasil menemukan hari jadi DPRD Kota Surakarta. Dengan ditemukan kepastian hari jadi DPRD Kota Surakarta, dimasa mendatang dapat dijadikan sebagai landasan pijak arah perjuangan para wakil rakyat untuk mensejahterakan melalui peraturan-peraturan daerah yang memihak pada warga masyarakat kota Solo

Surakarta,
Drs. Budhi Presetyo, MSi
Ketua DPRD Kota Surakarta

Pengantar

Sekretaris DPRD Kota Surakarta

Melakukan pelacakan hari jadi lembaga perwakilan rakyat, DPRD Kota Surakarta, mau tidak mau perhatian kita mengacu pada sejarah masa lalu proklamasi kemerdekaan, Indonesia dan pembentukan DPR setelah KNI meleburkan diri menjadi satu kesatuan perwakilan rakyat.

Pergolakan politik di pemerintahan pusat menjadi salahsatu pilihan perwakilan yang mewakili aspirasi rakyat di daerah segera dibentuk di kota Surakarta. Tidak hanya perdebatan sengit terjadi diantara organ partai politik di kota Solo, akan tetapi semua dapat diatasi dengan baik para politisi partai yang melibatkan semua unsur pemerintah pusat dan daerah.

Percikan ketidakpuasan, kala itu terjadi antara aktivis partai politik dan pejabat pemerintahan daerah kota Solo. Hingga memicu aksi penculikan terhadap calon pemimpin daerah kota terjadi. Meski demikian semua dapat diatasi oleh para politisi dan tokoh penjuang rakyat agar kejadian penculikan tidak perlu dilakukan mengingat konsekwensinya sangat mahal akan terjadi pertikaian fisik diantara anak bangsa.

Peran penting dokter Muwardi meredam gejolak antarpolitical dengan para pejuang kemerdekaan pantas diacungi jempol. Muwardi mengingatkan bahwa Kota Solo, ketika itu masih menjadi incaran penjajah yang ingin kembali berada di kota Surakarta. Sejak itu wawasan kebangsaan para tokoh partai politik mulai mengeras untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan yang telah dicapainya dengan darah dan airmata.

Bukan hanya tokoh politik dan pejuang kemerdekaan, yang berjibaku mempertaruhkan janya mempertahankan kemerdekaan dan berusaha membangun demokratisasi melalui berbagai cara. Bukan hanya sekali, tokoh penegak demokrasi berusaha merealisasikan rencana

melembagakan perwakilan rakyat dalam satu wadah perjuangan di Solo. Setidaknya terjadi dua kali perdebatan pendapat sengit untuk waktu yang tepat, kapan kota Surakarta perlu mendirikan lembaga dewan perwakilan rakyat melibat komponen warga masyarakat maupun partai politik di kota Solo.

Perdebatan penting-tidaknya didirikan lembaga yang mewakili suara rakyat dalam membangun kota melalui persetujuan wakil-wakil di lembaga DPRD yang akan dibentuk di daerah, tak urung terdengar hingga pemerintahan pusat. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) yang baru saja dibentuk oleh DPR ikut ambil bagian meredakan ketegangan politik di kota Solo akibat perbedaan pendapat diantara para pejuang dan aktivis partai.

Kinkin Sultanul Hakim, SH., MH

BAB I

Melacak Jejak Sejarah Lembaga Wakil Rakyat

I Kilas Balik Pembentukan DPR

DPR hasil pemilu 1956 menghasilkan jumlah anggota terpilih pada waktu itu sebanyak 272 orang. Sementara itu Pemilu (Pemilihan Umum) tahun 1956 juga memilih 542 orang anggota konstituante. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda.

Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Maka, sesuai pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini adalah bakal calon badan legislatif di Indonesia.

Anggota KNIP berjumlah 60 orang. Sumber lain ada yang menyebutkan jumlahnya 103 anggota. Dalam melakukan pekerjaannya DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP). Badan berhasil menyetujui 133 RUU. Selain itu juga menetapkan aturan pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah ditentukan susunan pimpinan sebagai berikut:

1. Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua.
2. Mr. Sutardjo Kartohadikusumo sebagai wakil ketua.
3. Mr. J. Latuharhary sebagai wakil ketua II.
4. Adam Malik sebagai wakil ketua III.

1. Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Pada masa Republik Indonesia Serikat, badan legislatif terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat dengan jumlah anggota 32 orang, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya berjumlah 146 orang (49 orang dari anggota tersebut adalah perwakilan Republik Indonesia dari Yogyakarta).

Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amendemen, serta wewenang untuk menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) bersama pemerintah. Selain itu DPR juga memiliki hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket, namun tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet.

Dalam masa kerja kurang lebih setahun, berhasil diselesaikan 7 buah Undang Undang, yang di antaranya adalah UU No. 7 tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; diajukan 16 mosi, dan 1 interpelasi, baik oleh Senat maupun DPR.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)

Pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1850, LN No. 56/1950). Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat. Dalam rapat tersebut dibacakan piagam pernyataan tujuan terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

3. Pembubaran secara resmi negara RIS berbentuk federasi

Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.

4. Pembubaran secara resmi negara RIS

Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.

5. DPR hasil pemilu 20 Maret 1956 (1956-1959)

DPR hasil pemilu 1956 menghasilkan jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1956 juga memilih 542 orang anggota konstituante. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda.

6. DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasar UUD 1945 (1959-1965)

Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI. Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Presiden kemudian mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang isinya mengatur Susunan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong).

DPR-GR memiliki jumlah anggota sebanyak 283 orang. Semua anggota DPR-GR itu diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu. Sesuai keadaannya, hal ini menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945.

Mulai tahun 1960 hingga 1965, DPR-GR telah menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.

7. DPR hasil pemilu 20 Maret 1956 (1956-1959)

DPR hasil pemilu 1956 menghasilkan jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1956 juga memilih 542 orang anggota konstituante. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda

8. Masa DPR Gotong Royong tanpa PKI (1965-1966)

Setelah peristiwa gerakan 30 September atau yang lazim dikenal dengan nama Partai Komunis Indonesia, G.30.S/PKI, DPR-GR melakukan pemurnian dan pembekuan sementara terhadap 62 orang anggota DPR-GR yang diduga terlibat sebagai anggota PKI dan ormas-ormasnya. Masa kerja DPR-GR tanpa PKI adalah 1 tahun. Sepanjang itu DPR-GR tanpa PKI telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu:

Periode 15 November 1965-26 Februari 1966.

Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966.

Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966.

Periode 17 Mei 1966-19 November 1966.

Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut. Dalam situasi demikian, DPR-GR mengeluarkan

keputusan membentuk dua panitia yakni Panitia Politik yang berfungsi mengikuti perkembangan di bidang politik, dan Panitia Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan untuk memonitor perkembangan ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran solutif.

9. Masa Orde Baru (1966-1999)

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966), DPR-GR Orde Baru (Orba) memulai kerja dengan menyesuaikan pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 adalah sebagai berikut:

Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sesuai pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya. Sesuai pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945, khususnya penjelasan bab 7, berikut penjelasan, anggota dewan berhak melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah.

10. Masa reformasi (1999-sekarang)

Cap keterlibatan beberapa anggota DPR acap menjadi salah satu yang sangat merugikan nama anggota dewan. Presenden buruk dan memalukan bagi citra wakil rakyat saat ini tak lebih baik dibandingkan dengan wajah para wakil rakyat sesuai kemerdekaan. Cerminan lain yang tak pantas diteladani kiprah wakil rakyat yakni ketidakmampuan anggota dewan menyelesaikan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) berdasar tenggat waktu yang telah disepakati. DPR masih banyak menyisakan pekerjaan yang belum terselesaikan hingga batas waktu pembahasan berakhir. Kinerja anggota DPR di era reformasi tentu membuat rakyat merasa tidak puas. Padahal berulang kali utusan warga masyarakat mengingatkan agar kinerja para anggota DPR perlu ditingkatkan, namun kenyataannya tidak seperti diharapkan.

Bila dibandingkan dengan kinerja DPR era reformasi dengan anggota DPR sesuai kemerdekaan, bak bumi dan langit.

BAB II

Kilas Balik Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

1. Masa Revolusi dan Pembakaran Hominte

Tidaklah mengherankan bila warga masyarakat tak mengetahui hari lahir lembaga perwakilan rakyat kota Solo. Bukan hanya rakyat yang tidak mengetahui tentang hari kelahiran Lembaga bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, tetapi juga tidak banyak referensi mengenai hal itu. Bila dibandingkan dengan penetapan hari jadi Kota Solo, misalnya, keberadaan wakil rakyat tersebut mestinya lebih dahulu terbentuk, sebelum ulang tahun pemerintah kota Surakarta ditetapkan.

Apakah kemudian penetapan hari jadi pemerintahan kota Solo, bulan Juni dapat dijadikan sebagai batu pijak landasan berdirinya lembaga wakil rakyat tampaknya tidak sepenuhnya bisa menjadi argumentasi yang valid untuk menyamakannya. Apabila pemerintah kota Solo telah menetapkan hari jadi pada bulan Juni, secara akademik tim pelacak berdasar tracking penelusuran mendalam berbagai literatur maupun referensi membuktikan bulan Juni Kota Solo tidak bisa dijadikan sebagai landasan hari jadi DPRD Kota Surakarta.

Salah satu acuan yang diperoleh tim pencari fakta, pada 6 Mei 1946 presiden Soekarno menetapkan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS pada tanggal 6 Mei 1946). Selain itu Dewan pimpinan KNI (Komite Nasional Indonesia) Kabupaten Kota mengeluarkan maklumat yang mengangkat Sindoeredjo sebagai kepala daerah kabupaten kota Surakarta.

Bupati kota Martonegoro sedang perlop dan wakilnya Soerjaningrat merasa tidak berkeberatan menyerahkan kekuasaan pemerintah kabupaten kepada KNI Daerah Kota. KNI Kabupaten Kota dengan

dewan pemerintahannya serta Kepala Daerah Sindoeroedjo inilah yang nanti merupakan suatu dasar bagi pemerintahan daerah kota besar Surakarta atau haminte, suatu bentuk pemerintahan baru bagi kota Surakarta lepas dari pemerintahan keraton¹

Pertanyaannya kemudian yaitu apakah penetapan DIS dapat digunakan sebagai acuan terbentuknya hari jadi lembaga DPRD Kota Surakarta. Hasil pelacakan tim menemukan fakta bahwa sehari setelah 6 Agustus 1946, Residen Surakarta, pada tanggal 7 Agustus mengeluarkan maklumat pembentukan dan susunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengganti KNI (Komite Nasional Indonesia) Daerah sebagai Badan Legeslatif. Apakah maklumat setelah penetapan kota sebagai DIS dapat menjadi batu pijak sebagai hari jadi pembentukan DPRD Kota Besar Kabupaten Surakarta, tampaknya perlu ditelaah lebih mendalam.

Dengan diangkatnya seorang residen yang cakap, seakan-akan daerah Surakarta menjadi tenang kembali. Pemerintah daerah menjadi stabil. Akan tetapi sayang keadaan yang stabil ini tidak dapat lama dipertahankan, karena tiba-tiba pada tanggal 9 November 1946, residen Iskak dengan wakil residen Soediro diculik oleh suatu gerombolan. Dari golongan yang tertentu telah diangkat sebagai resident Sdr. Soejas dan sebagai wakilnya Sdr. Dasoeki. Tetapi kedua pejabat ini hanya sebentar saja menduduki kursi pemerintahan³

Sementara itu pemerintah pusat menganggap perlu bahwa residen Iskak dan wakil residen Soediro untuk sementara waktu tidak menjalankan lagi kewajibannya. Pemerintahan daerah yang berlangsung saat itu dipimpin oleh Badan Executif Karisidenan (BEK), yang terdiri: 1) Roespandji (PNI), 2) A. Hasan (Pemuda), 3) Hartojo (PBI), 4) Moetokalimoen (Partai Sosialis), 5) Siswosoedarmo (Masjumi). Pengangkatan kelima anggota BEK berlangsung hingga 6 Desember 1946.

Pada tanggal 14 November 1946, jabatan walikota yang dulu

dirangkap oleh residen Iskak diisi Sjamsuridjal. Dalam upacara pelantikan yang akan dilangsungkan, presiden tidak jadi datang. Atas nama pemerintah pusat sebenarnya residen Iskak, sebagai pejabat tertinggi di daerah dapat melantik, tetapi lantaran Iskak sedang diculik sehingga Sjamsuridjal melantik dirinya sendiri. “Pak Sjam telah memberanikan diri melantik diri sendiri sebagai walikota Surakarta”

Pada tanggal 6 Desember 1946 pemerintah pusat mengangkat gubernur Soetardjo Kartohadikoesoemo menjadi pemimpin pemerintah daerah Karisidenan Surakarta. Pada 17 Februari berlangsung sidang Dewan Perwakilan Rakyat

Perwakilan Rakjat Daerah Surakarta, yang dipimpin langsung Gubernur Soetardjo Kartohadikoesoemo. yang dikemukakan pada sidang DPR agar memberikan otonomi kepada Rijk Kasunanan dan Mangkunegaran, tetapi ditolak DPR. (Lihat lampiran sidang pertama DPRDS pertama)

Pada 27 Maret 1947, gubernur Soetardjo dibebaskan dari kewajibannya sebagai kepala daerah dan wakil residen Soediro ditunjuk sebagai pemangku jabatan kepala daerah Karisidenan Surakarta. Pada bulan Juni 1947 Haminte Kota Surakarta ditetapkan berdiri berdasar Undang-Undang Pembentukan (Instellings ordonnantie) nomor 6 tahun 1947. Selain itu Badan Eksekutif (Dewan Pemerintah Kota) yang pertama menurut keputusan residen no.6/1946 terdiri dari 5 orang dengan anggota antara lain: 1) Siswodjijo, 2) Mr Soedjak, 3) Tjondrodiprodjo, 4) Soebekti, 5) Soejitno. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakjat Haminte Kota terdiri dari 50 orang.

Perlu diterangkan bahwa pengertian Haminte atau Balai Kota menurut UU Pembentukan adalah merupakan Balai Kota Istimewa mempunyai hubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan sejajar dengan karisidenan. Sedang wali kota setara dengan residen. Sifat keistimewaan ini mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, karena memang riwayat pembentukannya melalui

djalan jang rumpol berliku-liku dan mengingat pula bahwa waktu itu kota Solo diakui sebagai kota jang keadaannya serba luar biasa: “Djanma mara djanma mati” atau istilah peninjau asing dikenal sebagai ‘hot spot’ atau ‘heksenketel’ dimana segala keanehan mungkin terjadi sewaktu-waktu.

Pernah kita dengar ucapan-ucapan para pemimpin kita, diantaranya Sri Sultan ‘Djika Solo beres, seluruh Indonesia beres’ Dalam pertengahan bulan Juli 1947 wakil residen Soediro diangkat menjadi residen Surakarta. Dengan ditetapkannya jabatan walikota Sjamsuridjal dan residen Soediro sebagai pejabat pemerintahan di daerah Surakarta lengkap dengan dewan perwakilannya dan badan eksekutifnya, semuanya kemudian berjalan lancar.

2. Dualisme Pemerintahan Kota Solo dan Penyerbuan Belanda

Pada tanggal 21 Desember 1948, Kota Surakarta diduduki tentara Belanda. Dengan didudukinya kota Solo. Siasat Belanda melakukan pendudukan Kota Solo agar dunia internasional mengetahui pemerintahan republik Indonesia sudah tidak berfungsi dan diganti oleh pemerintahan Belanda. Nampaknya strategi Belanda keliru, residen beserta staf dan tentara tidak meninggalkan kota, tetapi melakukan gerilya menghimpun kekuatan bersama rakyat, meskipun hominte dijadikan karang-abang, dibakar rakyat.

Para pemimpin gerilya dan pejuang bersama rakyat bahu-membahu melakukan perlawanan, meskipun walikota Sjamsuridjal ditangkap dan dipenjara Belanda. Untuk mengatasi hal demikian, menteri dalam negeri, Dr Soekiman, pada tanggal 24 Januari 1949 diberi mandat oleh residen Surakarta untuk merangkap jabatan sebagai walikota Surakarta. Dalam menjalankan kegiatannya, residen yang juga menjadi walikota mengangkat seorang mahasiswa Soedjatmo Soemowerdojo untuk melakukan tugas sehari-hari di balaikota dibantu oleh Soeharjo Soerjoprano membentuk pemerintahan pada pertengahan Februari 1949. Praktis Belanda⁷ menduduki kota Solo satu setengah bulan dan

membentuk pamong praja. Meski bentukan pamong praja tersebut merupakan ilegal menurut aturan hukum kolonial, dan telah pula disyahkan melakui beluit. Tugas keseharian di balaikota pada waktu itu didominir oleh para pelajar dan mahasiswa dalam susunan pemerintahan.

Kegaduhan lain muncul sebagai akibat pendudukan Belanda di kota Solo yakni pembentukan pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran dengan perlindungan kekuasaan militer Belanda membentuk pamong praja. Meski demikian bentuk yang diharapkan Belanda tidak berjalan sebagaimana diharapkan lantaran tidak didukung seluruh rakyat. Meski terjadi dualisme pemerintahan di dalam kota Solo, yakni: pemerintahan Swaprja⁸ Kasunanan dan Mangkunegaran yang diakui dan dilindungi militer Belanda. Sedangkan pemerintahan yang kedua adalah Pemerintah Republik Indonesia dianggap seolah-olah merupakan pemerintahan bayangan (*schaduw bestuur*), tetapi kedudukannya sangat kuat karena memperoleh sokongan rakyat. Selain itu Markas Besar Komando Jawa (MBKD) juga melakukan pelaksanaan sistem pertahanan rakyat semesta, bila pemerintahan Belanda benar-benar akan melakukan serangan militer terhadap Republik Indonesia. Pemerintah siasat No 1 dari Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia diambil berdasar pengalaman TNI selama agresi militer Belanda yang pertama kali pada tanggal 21 Juli 1947 di Jawa Barat. Pasukan Belanda dengan peralatan perang modern dibandingkan dengan Angkatan Perang Republik Indonesia tentu tidak imbang bila ditandingi dengan peralatan tempur sederhana.

Kelima instruksi MBKD mengeluarkan Perintah Siasat No 1 antara lain: 1) agar tidak akan melakukan pertahanan linier, 2) memperlambat kemajuan serbuan musuh serta pengungsian total serta bumi hangus total, 3) membentuk kantong-kantong di tiap Ondersdistrik Militer mempunyai pemerintahan gerilya (*wehrkreise*), 4) tugas untuk melakukan wingate atau menyusup ke dalam kantong gerilya, 5) tetap setia mempertahankan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Kelima instruksi komando MBKD dalam perintah

siasat tersebut merupakan tugas tentara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, jika terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Pemerintah siasat yang dikeluarkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman tersebut benar-benar terjadi ketika Belanda melancarkan agresi militer yang kedua terhadap Indonesia di Ibukota Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1948, pemerintah Belanda melakukan agresi militer dengan melanggar perjanjian gencatan senjata Renville yang diterima di Yogyakarta pukul 5.30 sore. Pada saat penyerangan menggunakan pesawat pembom Belanda, utusan PBB (KTN) sedan berada di Kaliurang yang letaknya sangat dekat dengan ibukota Republik⁹ bom dan roket dijatuhkan di berbagai tempat-tempat militer. Menjelang tengah malam, setelah mengepung kota, pasukan Belanda berhasil mencapai pusat kota ke Istana Presiden. Rencana lain setelah Belanda menduduki ibukota Republik di Yogyakarta tentara militer Belanda menduduki ibukota Republik di Yogyakarta, tentara militer Belanda berupaya merebut karisidenan Solo dengan harapan kedua tempat yang dijadikan basis markas kegiatan tentara republik dapat dikuasi. Namun yang terjadi rakyat beserta tentara republik telah bersiap melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Meskipun komandan Belanda di Jawa Tengah Mayor Jenderal Meyer meminta agar Presiden Soekarno memerintahkan pada pasukan agar menghentikan perlawanan tetapi permintaan Mayor Jenderal Meyer ditolak Soekarno. Penolakan Presiden Soekarno disikapi Jenderal Meyer dengan melakukan penangkapan tokoh-tokoh kemerdekaan. Pada tanggal 22 Desember 1948, Soekarno, Hatta, Syahrir, Mr Assaat (Ketua Badan Pekerja dan Parlemen), Mr Abdul Gafar Pringgodigdo (Sekretaris Presiden), M Agoes Salim, Mr Ali (Menteri Pendidikan), dan Komodor Udara Suriadarma ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka.¹⁰ Sedang Presiden Soekarno, Syahrir, dan Agoes Salim dipisahkan dari yang lainnya dan diterbangkan ke Berastagi, dan kemudian dipindahkan ke Propan, Danau Toba yang terletak di sekitar daerah perbatasan Sumatera Tengah dan Sumatera Utara.

Memperoleh kabar penangkapan para pemimpin republik di Yogyakarta seluruh rakyat Solo bersama tentara memperkuat barisan perlawanan gerilya di seluruh wilayah perkampungan kota. Apalagi mengetahui strategi pemerintah Belanda yang ingin menguasai kota Solo dengan tujuan agar terjadi kekosongan pemerintahan republik Indonesia yang berada di Yogyakarta.

3. Perjalanan Panjang Pembentukan DPRD Kota Surakarta

Jalan terjal sebelum pembentukan lembaga yang dapat dijadikan sebagai representasi perwakilan rakyat Kota Surakarta tampaknya masih panjang. Perseteruan antarpejabat sesuai negara dinyatakan dalam keadaan aman terus terjadi. Apalagi model yang dapat menjadi acuan dalam sistem ketatanegaraan secara lebih demokratis dalam pemerintahan Haminte di Kota Solo belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Haminte atau kota yang semula digadang-gadang menjadi pusat pemerintahan kerisidenan, juga belum sepenuhnya berjalan efektif usai kemerdekaan. Apalagi kedudukan pemerintahan civiel pada masa peralihan mengalami double bestuur di Solo. Pemerintahan Republik Indonesia Balai Kota yang merupakan staf Civiel dari sistem bentuk pemerintahan militer, dan pemerintahan swapaja yang juga sedang dibangun. Ditariknya tentara pendudukan Belanda dari Surakarta, juga menjadi persoalan tersendiri. Pada siapakah pemerintah nantinya diserahkan.

4. Riwayat Perjuangan dan Gegeran

Bila merujuk sejarah masalah, kebakaran Haminte atau yang sekarang terkenal dengan sebutan Balai Kota Surakarta pernah dibakar pada waktu tentara Belanda ingin menduduki kota Solo setelah berhasil merebut ibukota Yogyakarta. Warga kota dan para pejuang bersama militer berusaha membendung serangan bertubi-tubi yang dilakukan Belanda. Untuk kedua kalinya, Belanda mengikari persetujuan perjanjian Renville dan melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Belanda berhadil menguasai ibukota RI Yogyakarta dan para

pemimpinnya ditangkap dan ditahan oleh Belanda. Namun tidak serta merta RI jatuh, karena sebelumnya telah dibentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi sebagai antisipasi.

Sementara itu sebelum meninggalkan Yogyakarta, Jenderal Soedirman sempat mengeluarkan sebuah perintah harian yang ditujukan ke seluruh prajurit TNI, yaitu agar menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan sehubungan telah diserangnya Yogyakarta, merupakan pelanggaran gencatan senjata oleh Belanda. Perintah harian tersebut dikenal dengan perintah kilat No.1/P.B/D/1948 yang isinya:

1. Kita telah diserang
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan Gencatan Senjata
4. Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan menghadapi serangan Belanda.

Panglima Besar juga membentuk dua Komando Daerah Pertahanan yang langsung berada di bawah komando, yaitu:

1. Komando Daerah Pertahanan Jawa di bawah Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorium Jawa (PTTD) dengan markasnya di Yogyakarta, yang disebut Markas Besar Komando Jawa *MBKD), Komando Daerah Pertahanan Sumatera di bawah Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS) dengan markasnya MBKS¹¹
2. Atas dasar pertimbangan dengan tertwannya pemimpin-pemimpin RI dan untuk segera dapat mengisi kekosongan pemerintahan sipil PTTD Kolonel Nasution mengeluarkan Mklumat No.2/MBKD pada tanggal 22 Desember 1948,
3. Mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh

Jawa, dengan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat total, yaitu dengan maksud menggunakan sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta (Hankamrata)¹²

4. Berhasilnya serangan pasukan-pasukan RI (terutama dengan serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta) dunia Internasional mentahu betul, bahwa RI tetap eksis dan TNI tidaklah hancur dari Indonesia

5 Dualisme Pemerintahan Kota Solo

Sistem pemerintahan setelah berakhirnya kekuasaan bala tentara Jepang, aparat pemerintahan umum masa penjajahan, sepanjang berhaluan dengan semangat Proklamasi, menjadi dinasionalkan dan hal itu dikuatkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1945, sebagai Undang-Undang Pokok tentang pemerintahan daerah yang pertama, yang memuat peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah,¹³ namun menurut pasal dalam Komite Nasional Daerah, Komite Nasional Daerah ini tidak diadakan di Surakarta dan Yogyakarta, karena kedua daerah ini merupakan daerah Istimewa. Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa.

Keistimewaan daerah istimewa adalah bahwa kepala (wakil kepala) Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dan keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu, di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan mengingat pula ada istiadat di daerah itu. Sesuai dengan penting atau tidaknya kedudukan sesuatu daerah istimewa, daerah itu akan diberi kedudukan yang setingkat dengan provinsi, kabupaten atau desa¹⁴

Setelah Proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Piagam penetapan berkaitan dengan sistem pemerintahan di daerah Surakarta, yaitu menetapkan Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan Sri Mangkunegoro VIII sebagai kepala

Pemerintahan Swapraja¹⁵, keputusan ini menimbulkan reaksi rakyat yang tidak menghendaki adanya pemerintahan yang bersifat feodal.

Pertentangan masalah Swapraja ini menimbulkan gerakan politik memanas di kota Surakarta. Disatu sisi ada beberapa pihak yang tetap menghendaki pemerintahan Swapraja tetap berlangsung, namun di pihak lain ada gerakan-gerakan yang menentang pemerintahan Swapraja. Di kalangan masyarakat timbul keresahan dan usaha untuk menggulingkan pemerintahan Swapraja dan menuntut pemerintahan Republik Indonesia agar membubarkan model pemerintahan Swapraja karena tidak searas dengan jiwa proklamasi

Dilingkungan pegawai Swapraja sendiri muncul ketidakpuasan terhadap para pemimpin pemerintahan Swapraja dan oleh sebab itu telah mulai menuntut agar para pemimpin-pemimpin tersebut diganti dengan tenaga muda berjiwa revolusioner. Untuk mengatasi keadaan yang kacau ini, Menteri Dalam Negeri ketika itu, Mr. Dr Soedarsono, mengangkat Gubernur Suryo pada tanggal 27 Mei 1946 sebagai wakil pemerintahan di daerah Surakarta. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah mengerluarkan penetapan pemerintahan No.16/SD/1946 tertanggal 15 Juli 1946, antara lain menegaskan bahwa untuk sementara waktu daerah Surakarta dijadikan daerah karisidenan serta pemerintah di daerah-daerah Surakarta dan Yogyakarta berada langsung di bawah pimpinan pemerintah pusat¹⁶

Hal penting lain terjadi pada tanggal 7 Oktober 1946 delegasi Belanda dan delegasi Indonesia berunding, untuk mencapai kesepakatan soal Swapraja. Perundingan tersebut diadakan dengan perantaraan Lord Killern dari Inggris. Delegasi Belanda, melalui Commissie General yang dipimpin Professor W Schermehorn dan delegasi Indonesia dipimpin Sutan Syahrir. Perundingan tersebut dikenal dengan perundingan Linggarjati, yang akhirnya pada 25 Maret 1947 antara kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut yang salah satu hasil perundingan adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera, serta Republik Indonesia dan Belanda

akan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS)¹⁷

Akibat perbedaan tafsiran tentang isi Persetujuan Linggarjati, pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan Agresi Militer mereka yang pertama. Penyerangan Belanda kepada Indonesia ini mempunyai gema internasional, sehingga akhirnya PBB memerlukan turun tangan untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan tercapailah persetujuan Renville berkat usaha Komsis Tiga Negara (KTN) yaitu Australia, Belgia dan Amerika Serikat.

Politik Amir Syarifuddin menghasilkan persetujuan Renville menimbulkan reaksi kotra yang luar biasa, baik dari kalangan partai-partai maupun militer. Bahkan banyak pihak-pihak tentara tidak sudi melaksanakan hasil Renville. Bagi Indonesia persetujuan Renville merupakan kerugian militer, dalam kaitan ini Kolonel A.H. Nasution memimpin 22.000 prajurit Siliwangi keluar wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda, menuju wilayah Jawa Tengah yang dikuasai RI.

Akibatnya, di Jawa Barat di atas kertas telah dikosongkan dari unsur-unsur kekuatan Republik Indonesia sebagai konsekuensi dari persetujuan Renville. September 1948 suasana di kota Surakarta juga dibayang-bayangi peristiwa usaha pemberontakan oleh anggota FDR/PKI. Menghadapi situasi di kota Surakarta yang sedang kacau tersebut, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah harian yang menyatakan bahwa APRI adalah alat negara dan penjamin kedaulatan negara.

Serangan terhadap alat negara akan dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara, dan selanjutnya atas saran dari Panglima Besar kepada Presiden RI selaku panglima tertinggi, setelah berunding dengan Kepala Staf Operasi Kolonel A.H. Nasution, pada tanggal 16 September 1948 malam Menumpas pemberontakan PKI melakukan upacara milieternya yang terakhir di Solo.

Untuk menanggapi pecahnya Agresi Militer Belanda II, Panglima

Besar Jenderal Soedirman telah menugaskan Komandan Komando Jawa Kolonel A.H. Nasution agar mengatur siasat bagi seluruh angkatan perang. Pokok-pokok perintahnya dituangkan dalam perintah siasat No.1 yang isinya sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan pertahanan yang linier
2. Tugas memperlambat kemajuan serbuan musuh serta mengusir total serta bumi hagus total
3. Tugas membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik Militer yang mempunyai pemerintahan gerilya (disebut *wehrkreise*) yang totaliter dan mempunyai pusat di beberapa kompleks perumahan
4. Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari "daerah Federal" untuk *wingate* (menyusup kembali ke daerah asalnya) dan membentuk kantong-kantong, hingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang luas.

Dengan keluarnya perintah Siasat No. 1 tersebut, maka tiap-tiap komandan pasukan telah mempunyai pegangan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Oleh karena itu, Komandan Komando Militer Daerah Kota Surakarta, Mayor Achmadi telah mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan dari Belanda¹⁸

Perkembangan selanjutnya Surakarta dibantu daerah-daerah perlawanan yang dinamakan "*wehrkreise*" untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah Surakarta akibat persetujuan Renville yang diduduki Belanda. Untuk menyesuaikan dengan perjuangan yang dibentuk melalui sistem *wehrkreise*, maka dalam bidang pemerintahan dibentuk pula sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan keadaan perang yaitu Komando Militer Daerah Kota Surakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan Agresi Militer yang kedua terhadap wilayah RI, termasuk daerah Kota Surakarta, namun pasukan Belanda baru memasuki kota Solo pada

tanggal 20 Desember 1948 setelah melalui pertempuran dengan TNI. Setelah menyambut serbuan tentara Belanda dengan kontak senjata di berbagai bagian kota Solo, sesuai strategi perang Gerilya yang diperintahkan berlaku mulai saat itu seluruh pasukan TNI meninggalkan kota Solo menuju daerah gerilya masing-masing.

Wilayah-wilayah operasional gerilya ini kemudian dikenal dengan serbuan Sub Wehrkreise 106 Arjuna atau disingkat SWK 106 dengan Mayor Achmadi sebagai komandannya. Setelah melakukan konsolidasi, pada tanggal 22 Desember 1948 Mayor Achmadi mengadakan rapat Komando Daerah Solo (KDS) untuk membagi pasukan ke dalam empat rayon-rayon, selesai terbentuk tanggal 23 Desember 1948. Perkembangan selanjutnya selama perang gerilya, dibentuk lagi dua daerah Sub Rayon yang masing-masing berdiri sendiri, yakni Sub Rayon IV dan Sub Rayon I. Tiap-tiap Rayon kemudian dibagi lagi dalam sektor-sektor. Bentuk pemerintahan militer yang berlaku di daerah Surakarta tersebut mulai berlaku sejak tanggal 25 Desember 1948, dan tidak hanya di daerah Surakarta saja namun juga berlaku di seluruh wilayah Jawa.

Bentuk pemerintahan ini berlangsung ini berlangsung selama Belanda menduduki wilayah Indonesia pada umumnya dan daerah Surakarta pada khususnya. Berlakunya pemerintahan darurat militer untuk seluruh Pulau Jawa juga mempengaruhi pemerintahan di kota Surakarta, yaitu terbentuknya pemerintahan gerilya yang akan berhadapan dengan pendudukan pemerintah dan pasukan Belanda di kota Surakarta. Mencermati kembali latar belakang di atas, menarik dijadikan batu pijak untuk melacak jejak sejarah masalah terkait dengan pemerintahan darurat militer di Jawa dan pengaruhnya terhadap pemerintahan Kota Surakarta, terutama mengenai pembentukan lembaga wakil rakyat setelah kemerdekaan.

Metode Pelacakan & Rujukan Penentuan Hari Jadi

Tidak berlebihan bila pelacakan hari jadi lembaga wakil rakyat yang

dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta tetap mengacu pada peristiwa masalah dari berbagai sumber referensi. Buku George Mc Tuman Kahin, menjadi salah satu rujukan penting tentang pergolakan masa revolusi. Paparan konflik antar pemerintah Indonesia dengan Belanda melalui perundingan, dan penyerangan dari pihak Belanda terpapar jelas sebagai awal mula penentuan hari jadi lembaga wakil rakyat di Solo

Pengingkaran perundingan Linggarjati dan Renville, dalam buku George Mc Trunan Kahin menjadi sangat relevan dijadikan titik awal penentuan terbentuknya lembaga wakil rakyat di Kota Solo. Selain itu, konflik bersenjata dan pergolakan Komunis tahun 1948 di Madiun yang kemudian berimbas pada memilah dua kubu calon wakil rakyat, juga menjadi acuan penentuan hari jadi. Selain itu, Kahin juga membahas dalam bukunya tentang perkembangan politik dalam negeri Indonesia yang berlangsung selama masa revolusi. Munculnya beberapa partai di tanah air mencuatkan perdebatan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintahan di daerah. Buku lain sebagai referensi, kami juga mempelajari dan mereview sebagai referensi tonggak penentuan hari jadi, yakni buku karya A.H Nasution berjudul "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia" sehingga dapat memberi gambaran jelas peta perselisihan penentuan kapan lembaga wakil rakyat di daerah perlu didirikan

Buku lain yang dijadikan sumber referensi yakni karya Ulf Sundhaussen berjudul Politik Militer Indonesia 1945-1967 antara lain membahas kemunculan Pemerintahan Darurat dari kalangan Militer, dan kaitan dengan efek demoralisasi dalam masyarakat. Efek demoralisasi itulah, yang kemudian mencuatkan dugaan lembaga wakil rakyat acap digunakan sebagai kendaraan kepentingan kelompok tertentu sejak awal berdiri. Dari buku-buku referensi itulah muncul preferensi kebijakan seperti apakah yang telah dan akan dicetuskan dalam putusan ketetapan peraturan di daerah.

Buku bacaan menarik tentang Perjuangan Gerilya Membela Kemerdekaan Negara dan Bangsa yang diterbitkan 1995 di Jakarta

oleh Paguyuban Pelaku Pemerintahan RI Balai Kota Surakarta dalam pendudukan Belanda tahun 1948-1950 memberi wawasan lain mencermati sejarah masalah Kota Solo. Buku yang mengulas situasi dan kondisi pemerintahan pada pendudukan Belanda tahun 1948-1950, memaparkan pemerintahan militer di Solo, perang gerilya saat keadaan darurat perang. Buku lain, yang bermanfaat, diterbitkan Dewan Redaksi Sejarah Ex Anggota TNI Detasemen II Brigade 17 yang menerbitkan "Ofensif TNI Empat Hari di Kota Solo dan Sekitarnya" memberi gambaran perjuangan warga kota bersama tentara mengusir Belanda tahun 1948-1950.

Pelacakan hari jadi, kalau bisa dikatakan sebagai studi sejarah masalampau, jelas suatu proses panjang untuk menguji dan melakukan analisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau²⁰ Penelitian, katakan indepth report yang dilakukan tim IMSs, jelas menggunakan metode kritis dengan langkah-langkah bertahap dan saling bersinambungan. Tahapan menelisik tentu tak akan melewati metode herusitik, yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dalam meneliti. Data-data dari sumber primer dan sekunder menjadi bagian tak terpisahkan untuk penentuan kesimpulan pelacakan hari jadi suatu lembaga wakil rakyat. Studi dokumen diperoleh dari perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran dan Perpustakaan Yogyakarta maupun Radyo Pustako di Solo.

Kronologi peristiwa merupakan hal sangat penting artinya, yang kami pandang sebagai dokumen atau arsip kesaksian tertulis dari sebuah peristiwa penting di masa lalu. Studi pustaka juga kami lakukan dengan mengupulkan buku-buku atau literatur untuk dijadikan referensi dalam pelacakan hari jadi sebuah lembaga penting di suatu kota. Diskripsi historiografi terkait dengan jalinan kausalitas atau sebab akibat suatu peristiwa juga kami lakukan secara kronologis, berdasar temuan lapangan setiap tahap berdasar data referensi yang relevan.

Analisis data diskriptif, diharapkan memberi gambaran suatu fenomena ciri-ciri khusus yang terdapat dalam suatu peristiwa terkait

topik utama, terbentuknya lembaga bernama DPRD Kota Surakarta. Tim pelacak data sekunder maupun primer terkait dengan pencarian hari jadi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan sejak 8 Maret 2019 sampai batas yang dimungkinkan memperoleh fakta mendekati kebenaran sejarah.

BAB III

PEMERINTAH DAERAH SURAKARTA

PASCA KEMERDEKAAN & PEMBENTUKAN DPRD

SEBAGAI LEMBAGA WAKIL RAKYAT

I. Pemerintahan Surakarta Pasca Kemerdekaan

Tanggal 22 Agustus 1945 pemerintah pusat membentuk Komite Nasional Pusat. Segera setelah Komite Nasional Pusat (KNI) dibentuk, maka para tokoh terkemuka di Surakarta berusaha membentuk KNI daerah Surakarta²¹. Usaha ini berhasil dan sidang pertama diadakan pada bulan September 1945. KNI daerah Surakarta terbentuk dengan diketuai oleh Mr Soemodiningrat seorang bangsawan yang pernah menjabat opsir dalam pasukan PETA (Pembela Tanah Air). Program yang ditetapkan pada waktu itu adalah melucuti senjata tentara Jepang dan memindahkan kekuasaan pemerintah Jepang di Surakarta ke tangan KNI daerah Surakarta 22

Tanggal 30 September 1945 KNI Daerah yang dipimpin Mr Soemodiningrat berhasil memaksa pembesar-pembesar Jepang di bawah pimpinan H Watanabe untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada KNI. Peristiwa ini terjadi di Balai Kota dan disaksikan oleh beribu-ribu masyarakat Surakarta. Kantor yang dinamakan dengan nama Jepang diganti nama dengan KPPRI (Kantor Pusat Pemerintahan Republik Indonesia). Nama ini dipandang kurang tepat, kemudian diganti dengan KDPR (Kantor Daerah Pemerintahan Republik Indonesia). Setelah pemindahan pemerintahan berhasil dilakukan, maka KNI Daerah berusaha untuk melaksanakan tugas keduanya yaitu melucuti senjata tentara Jepang. Hal ini ditindaklanjuti dengan melucuti senjata tentara Jepang.

Tanggal 19 Oktober 1945 Pemerintah Pusat mengangkat R.P Soeroso menjadi Komisaris Tinggi yang berkekuasaannya meliputi

daerah-daerah Istimewa Surakarta dan berkedudukan di Surakarta. RP Soeroso dalam tugasnya adalah sebagai Koordinator dari kedua pemerintahan Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran yang memiliki kekuatan hukum seperti tertera dalam UUD 1945 Bab IV Pasal 18 hal pemerintahan Daerah. Selain itu masih diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Piagam Penetapan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang pada pokoknya menetapkan Sri Paduka Paku Buwono XII dan Sri Paduka Mangkunegoro VIII pada kedudukannya masing-masing dengan kepercayaan, bahwa beliau-beliau itu akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, dan jiwa dan raga untuk keselamatan daerahnya sebagai bagian dari pada Republik Indonesia²³. Berkenaan dengan hal tersebut maka tidak mustahil kalau kemudian timbul perselisihan tentang siapa yang berhak memerintah, apakah KNI daerah atau pemerintahan Swapraja yang membuat adanya dua pemerintahan di Surakarta.

Usaha untuk mengatasi hal tersebut atau mengambil jalan tengah, maka diadakan perundingan lebih lanjut dari kedua pemerintahan itu, yang terdiri dari 9 orang, antara lain 5 dari KNI Daerah, 2 orang ditunjuk oleh Susuhunan dan 2 orang oleh Mangkunegaran. Badan perundingan ini diketuai oleh R.P Soeroso dalam kedudukannya sebagai Komisaris Tinggi. Badan ini kemudian dinamakan Direktorium. Dalam perjalannya direktorium atau penggabungan kekuasaan ini selalu timbul perselisihan sehingga tidak dapat bekerja sama dengan baik.

Pemerintah pusat kemudian mengangkat Gubernur Soerjo sebagai wakil pemerintah pusat. Langkah pertama yang dilakukan adalah meniadakan jabatan Komisaris Tinggi dan otomatis Direktorium yang diketuai oleh Komisari Tinggi statusnya menjadi tidak menentu. Gubernur Soerjo tersebut memegang jabatan tanggal 27 Mei 1946, namun sebelumnya KNI Daerah Surakarta telah mengangkat Sindoeredjo, menjadi kepala daerah yang membuat suasana pemerintahan di kota Surakarta menjadi semakin kacau.

Tanggal 27 Juni 1946 di Surakarta terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Sjahrir beserta rombongannya. Penculikan ini

merupakan salah satu akibat adanya pergolakan politik yang tak kunjung reda di Surakarta, namun pada tanggal 2 Juli 1946, Perdana Menteri Syahrir berhasil diselamatkan. Peristiwa lain yang pantas menjadi tonggak sejarah di kota Surakarta yakni:

1. Pemerintahan Swapraja di Surakarta tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Daerah Istimewa (DIS) atau Swapraja oleh pemerintah RI
2. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari para pejuang kemerdekaan di Surakarta dan menganggap hal ini bertolak belakang dengan semangat kemerdekaan atau revolusi. Kondisi ini merupakan awal munculnya reaksi hebat atas aksi anti Swapraja di Surakarta. Dilain hal, pihak dari pemimpin Swapraja sendiri, yaitu Mangkunegoro dan Raja Kasunanan pun juga mengikuti ketetapan dari presiden tersebut untuk berkuasa di Surakarta dan berada langsung di bawah Presiden RI. Hal itu semakin memperkeruh keadaan dan mempertajam gerakan anti Swapraja

Menyikapi terbentuknya pemerintahan Swapraja di Kota Surakarta, tersebut Gerakan Revolusioner bereaksi terhadap pernyataan kedua pemimpin Swapraja. Pada tanggal 9 Mei 1946 kaum revolusioner mengadakan rapat besar yang dihadiri beberapa organisasi politik yang dipimpin oleh Dr Muwardi. Tujuan rapat ini adalah untuk membentuk dengan segera badan legislatif secara demokratis dan melalui pemilihan langsung untuk menentukan anggotanya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk oposisi atas kekuatan Swapraja.

Tujuan gerakan ini yaitu: 1) Menuntut dihapusnya Daerah Istimewa atau Swapraja Surakarta; 2) Menuntut penggantian Raja atau Susuhunan; 3) Menuntut perubahan-perubahan dalam peraturan Daerah Istimewa atau Swapraja yang tidak sesuai lagi dengan jamannya.²⁴ Pada bulan April dan Mei 1946 suasana politik di Surakarta mulai panas. Satu sisi gerakan anti Swapraja berkembang luas hingga sampai ke masyarakat desa, sedangkan di sisi lain aksi penculikan-penculikan merajalela.

Penculikan terhadap pejabat keraton, yaitu pepatih dalem dan wakilnya tersebut menyebabkan kekosongan jabatan yang kemudian diisi oleh Woerjaningrat yang diangkat Paku Buwana XII. Permasalahan lain adalah sikap badan pekerja KNID Surakarta maupun daerah-daerah luar kota yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Swapraja Surakarta²⁵.

Untuk mengatasi permasalahan mengenai daerah Swapraja di Surakarta tersebut, tanggal 22-23 Mei 1946, pemerintah RI melalui Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri mengundang kedua penguasa Swapraja membicarakan keadaan Surakarta. Pembicaraan tentang keadaan Surakarta dan kekacauan akibat adanya kalangan pro dan anti Swapraja tersebut diikuti oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, Menteri Dalam Negeri Dr. Soedarsono dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin mewakili Pemerintah Pusat RI. Dari kementerian Swapraja sendiri diwakili oleh S.P Ingkang Sinuhun beserta wakil Papatih Dalem Woerjaningrat dan S.P KGPAA Mangkoenegoro beserta Papatih Dalem. Dari pertemuan tersebut akhirnya tanggal 15 Juli 1946. Pemerintah Republik Indonesia (RI) menetapkan Surakarta sebagai Daerah Karisidenan untuk mengendalikan situasi di Surakarta dengan mengeluarkan UU No.16/SD/1946 yang menyebutkan:

1. Jabatan komissaris Tinggi ditiadakan
2. Daerah Surakarta untuk sementara dijadikan daerah karisidenan
3. Dibentuk daerah baru dengan nama Daerah Kota Surakarta

II. Pemerintahan Karisidenan Surakarta

Keadaan politik di Surakarta sendiri saat itu juga tidak jauh berbeda dengan keadaan yang dialami bangsa ketika itu, yaitu keadaan yang tidak kondusif. Ketidakkondusifan wilayah Surakarta setelah kemerdekaan diantaranya dimulai adanya keresahan kalangan masyarakat yang

tidak mengendaki pemerintahan yang bersifat feodal, karena penetapan presiden yang menetapkan Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan Sri Mangkunegoro VIII sebagai kepala pemerintahan Swapraja.

Kalangan masyarakat kemudian melakukan usaha-usaha menggulingkan pemerintahan Swapraja dan menuntut kepada pemerintahan Republik Indonesia agar kepada pemerintahan Swapraja diganti dengan tenaga-tenaga yang berjiwa revolusioner. Pada bulan Juli 1946 pemerintah pusat mengambil langkah tegas, yaitu membekukan Pemerintahan Swapraja dan mengangkat seorang Residen untuk menjalankan pemerintahan. Mr. Iskak Tjokroadisoerjo dilantik oleh presiden sebagai residen di Surakarta dengan wakil residen Soediro dari Laskar Banteng.

Melalui beberapa kali pertemuan dengan pertimbangan maka jabatan sebagai residen waktu itu dipegang oleh Iskak Tjokroadisuryo dan wakilnya Soediro. Iskak Tjokroadisuryo dan Soediro setelah beberapa lama bertugas, akhirnya mampu menyelesaikan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Menghapus perbatasan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran, serta Kota Surakarta yang baru terbentuk, terdiri dari bekas wilayah Kasunanan (selatan rel kereta api) dan bekas wilayah Mangkunegaran (utara rel kereta api)
2. Dibentuk dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
3. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Daerah Surakarta dan untuk tiap-tiap kabupaten, dimana Dewan Perwakilan Rakyat bersama residen akan dipimpin oleh residen untuk mengatur pemerintahan sebaik mungkin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten dan Kota Surakarta bersama bupati dan walikota berusaha menyelenggarakan urusan pemerintahan di kabupaten dan kota Surakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk seluruh Karisidenan Surakarta.

Mereka harus selalu memberi laporan kepada residen dan wakil residen tentang segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan.

5. Semua bekas pegawai Kasunanan dan Mangkunegaran dijadikan pegawai daerah otonom baru dan dinyatakan tidak berada lagi di bawah pimpinan Paku Buwana dan Mangkunegoro VII.

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh residen dan wakil residen tersebut pada hakikatnya bersifat konstruktif bagi perkembangan Surakarta untuk menjadi daerah biasa dalam negara RI. Konsep tersebut disusun menuju kepada penghapusan struktur feodal dan menggantinya dengan struktur yang baru, demokratis sesuai UUD 1945.

Tanggal 8 Agustus 1946 dengan keputusan Residen Surakarta tanggal 7 Agustus 1946 ditetapkan bahwa telah dibentuk susunan Dewan Perwakilan Rakyat Surakarta (DPRS). Dewan Perwakilan Rakyat Surakarta menggantikan kinerja KNI Daerah sebagai Badan Legislatif. Tanggal 6 Desember 1946 diangkat Gubernur Soetardjo Kartohadikusumo untuk menjabat sebagai Residen di Surakarta, sedangkan walikotanya berkedudukan sejajar dengan seorang Residen. Hal ini mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat mengingat situasi dan kondisi politik Surakarta yang kacau balau ketika itu.

Pertengahan Juli 1947 Wakil Residen Soediro diangkat menjadi Residen Surakarta dan Sjamsuridjal sebagai walikota Surakarta. Deitetakannya walikota Sjamsuridjal dan Residen Soediro sebagai pejabat pemerintahan di daerah Surakarta lengkap dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka sedikit demikisedikit jalannya roda pemerintahan baik di kota Surakarta maupun Karisidenan Surakarta menjadi lancar.

Residen Soediro memiliki tekad menjadikan Surakarta sebagai

Karisidenan biasa dan bukan suatu daerah Istimewa ataupun Swapraja. Hal tersebut mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memberi mosi kepercayaan kepada Residen Soediro. Tugasnya diawali dengan mentertibkan pengawai-pegawai sipil dan memindahkan pengawai Mangkunegaran ke Kasunanan maupun sebaliknya, selain hal tersebut, Residen SOediro juga menertibkan barisan-barisan bersenjata, baik dari tentara resmi maupun badan-badan perjuangan bersenjata lainnya.

III Pemerintahan Tentara Rakyat

Keadaan Surakarta yang tidak kondusif membuat pihak tentara ingin mengambil inisiatif sendiri dengan mendirikan suatu pemerintahan. Pemerintahan Tentara Rakyat (PTR) atas inisiatif Komandan Tentara Divisi X Kolonel Soetarto yang kemudian menunjuk 6 orang diketuai oleh Soediro (Mbah Diro) untuk menjalankan apa yang disebutnya "Pemerintahan Tentara Rakyat". Adapun enam tokoh tersebut adalah, Rono Marsono, Djuwardi, Mr Dalyono, Mbah Diro, Dasuki dan Prodjowidodo.²⁶

Keadaan tersebut membuat lebih aktif lagi gerakan rakyat yang menentang Swapraja saat itu. Secara de jure kedua Swapraja ini memang kekuatannya kuat, tetapi secara de facto tidak memperoleh dukungan dari rakyat yang sedang bergolak karena pada dasarnya kedua raja yang berkuasa, yaitu Mangkunegoro dan Sunan kurang mampu mengambil hati rakyat yang sedang berjuang dan bergolak untuk menentang penjajahan yang ada. Masa pergolekan itu ternyata banyak organisasi-organisasi rakyat yang berjuang tanpa terkendalikan dan rakyat terpecah-pecah dalam kelompok yang sedikit banyak sudah berbau golongan, namun perjuangan mereka pada dasarnya tetap murni membela kemerdekaan Indonesia.

IV Dekrit Presiden Pembentukan TKR

Dekrit Presiden tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di daerah Surakarta juga dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pembentukan TKR diikuti oleh tokoh-tokoh Angkatan Muda Tentara KNI, Angkatan Muda Republik Indonesia dan tokoh-tokoh Angkatan Muda Tentara KNI, Angkatan Muda Republik Indonesia dan tokoh-tokoh di luar itu yang membuat proses pembentukan TKR tersebut berjalan tidak mudah melalui rintangan-rintangan yang sulit diatasi. Pihak KNI, AMT, dan AMRI setelah melakukan konsolidasi menetapkan calon Soetarto seorang bekas PETA untuk diangkat menjadi Komandan Divisi TKR di Surakarta. Meski demikian juga terdengar pula Pangeran Poerbonagoro, seorang kerabat keraton, keluaran Akademi Militer di negeri Belanda juga telah memimpin pasukan untuk dijadikan TKR

Kesimpangsiuran tersebut diduga berpengaruh kurang baik pada perjuangan pasukan yang sedang bertempur membantu pejuang-pejuang di Semarang. Namun segera dapat diatasi melalui pertemuan kekeluargaan dengan hasil pangeran Poerbonagoro akan membubarkan seniri pasukannya, dan menyatu pembentukan TKR tunggal, atas prakarsa KNI, AMT, BKR dan AMRI dengan calon tunggal Soetarto. Akhirnya usaha pembentukan TKR disetujui oleh pemerintah dan di Surakarta berdiri Divisi X Tentara Keamanan Rakyat dengan Komandan Divisi Kolonel Soetarto.

Resimen yang pertama dapat dibentuk, diserahkan pimpinannya kepada Suadi, suatu resimen yang terdiri dari 4 batalion 21 Resimen lain segera menyusul dan tumbuh dari kalangan para pejuang sendiri yang tersebar terorganisir di daerah. Badan-badan perjuangan juga terbentuk di Kota Surakarta, selain juga sudah berdiri TKR. Badan-badan tersebut berasal dari berbagai badan perjuangan dan laskar-laskar bersenjata seperti BPRI, Laskar Buruh Indonesia, Laskar Rakyat, Laskar Putri Indonesia, Hisbullah, Barisan Banteng, Laskar Kere dan Pesindo. Tanggal 24 Januari 1946 TKR berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia. Sedangkan Divisi X TKR berubah menjadi Divisi IV TRI dan berubah kembali menjadi Divisi IV TRI dengan panji bernama "Panembahan Senopati". Sejak itu nama Divisi IV TRI dikenal sebagai divisi Panembahan Senopati.

V. Pergolakan Sosial Politik di Solo

1. Penculikan pimpinan pemerintahan di Surakarta.

Berdasar literatur, residen ISkaq dan wakilnya Soediro dalam kedudukannya di Surakarta mendapat decking dari partai PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang merupakan salah satu partai memiliki kekuatan massa terbesar di kota Solo. Wakil Residen Soediro juga mendapat decking dari Barisan Banteng karena ia merupakan wakil Ketua Markas Besar Barisan Banteng. Posisi tersebut menguntungkan bagi kedua tokoh dan pengikut-pengikutnya, namun tidak bagi golongan politik lainnya, khususnya golongan sayap kiri (sosialis), meskipun disatu sisi golongan politik sosialis ini memiliki simpati terhadap pemerintahan Residen Iskaq dan wakilnya, dalam hal menghapuskan feodalisme yang juga memperoleh dukungan kaum pergerakan dan golongan anti Swapraja.

Dalam situasi yang tidak kondusif tersebut, terjadilah penculikan Residen Iskaq dan wakilnya Soediro. Penculikan itu dipimpin oleh Alip Hartoyo yang dikenal sebagai tokoh BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia). Kabar berita penculikan tersebut kemudian disampaikan kepada Dr Muwardi sebagai Ketua Barisan Banteng dan langsung menuju ke markas yang sudah diduduki kaum komunis yang diduga menyembunyikan Residen Iskaq dan wakilnya Soediro.

Sampai di tempat yang dituju, ternyata para kaum komunis yang banyak dari Partai Sosialis sudah siap untuk melantik Residen dan wakil dari golongan mereka sendiri yaitu, Soyas dan H Dasuki. Mengetahui hal tersebut, pimpinan Barisan Banteng, Dr. Muwardi, kemudian memberi ultimatum untuk segera membebaskan wakil residen Soediro, yang juga merupakan wakil ketua dari Barisan Banteng. Akhirnya wakil Residen Soediro dibebaskan oleh para penculik, tetapi Residen Iskaq tidak dibebaskan. Setelah dibebaskan, wakil residen, Soediro menceritakan perihal penangkapannya terhadap putranya yang menjadi Tentara Pelajar. Mendengar kabar berita tersebut, bersama laskar Tentara Pelajar, ayahnya Residen Iskaq dibebaskan juga oleh para penculik.

2. Jelang Pemberontakan PKI Madiun 1948

Kondisi Surakarta tampaknya juga pernah mengalami gejolak lantaran beberapa kalangan pejuang tidak puas kebijakan pemerintah pusat. Terkait dengan kebijakan kabinet Hatta, meliputi reorganisasi dan rasionalisasi (RERA). Kebijakan politik kabinet Hatta mendapat tantangan dari kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR) terbentuk tahun 1948 di Surakarta dengan pemimpinnya Amir Syariffuddin dari koalisi Partai Buruh, Partai Sosialis dan Pesindo. Pada gilirannya koalisi yang terbentuk FDR menggabungkan diri dengan PKI (Partai Komunis Indonesia)²⁷ Pertentangan antara pemerintah dan FDR/PKI semakin tajam dan mengarah ke bentrokan senjata. Tak pelak membuat Presiden Soekarno berang dan mengumumkan wilayah Surakarta dan sekitarnya dalam keadaan perang. Warga masyarakat harus tetap berada di rumah. Maklumat presiden, tentu saja membuat rakyat panik dan mengurung diri di dalam rumah hingga situasi dimungkinkan keluar dengan aman.

Jenderal Soedirman selaku panglima tinggi, kemudian memerintahkan untuk mengirimkan bala bantuan dari Divisi Siliwangi yang memang sedang berada di Jawa Tengah. Di daerah Surakarta sendiri, semakin nggegirisi dengan kedatangan tentara dari Divisi Siliwangi. Selain juga tempat pusat konsentrasi pasukan TNI (Tentara Nasional Indonesia), Tentara Pelajar (TP), dan pasukan yang tidak resmi seperti laskar Pesindo, BPRI, Barisan Banten, Hisbullah dan pasukan tempur berada di pusat kota Solo. Meski pada dasarnya tidak semua setuju dan mendukung kebijakan Kabinet Hatta, yang salah satu programnya terkenal dengan nama RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi.

Kelompok yang siap melaksanakan RERA (reorganisasi dan rasionalisasi) terdiri dari Batalion Pelajar, Hisbullah dan Barisan Banteng.²⁸ Adapun kelompok atau pasukan yang tidak mau melaksanakan RERA atau kelompok pro-FDR terdiri dari kesatuan-kesatuan Divisi IV/Panembahan Senopati yang kemudian berubah nama menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS)

dengan mendapat tambahan dari kesatuan-kesatuan mantan TNI di masyarakat dan Pesindo.

Pengaruh FDR teramat kuat di kalangan Divisi IV Panembahan Senopati di bawah Kolonel Sutarto yang kira-kira berjumlah 5000 orang. Daerah Divisi IV terutama di Surakarta dinilai memang sangat strategis. Dalam rasionalisasi, Divisi IV dijadikan kesatuan Reserve Uumu bersama dengan Divisi I Siliwangi.²⁹ Kondisi yang tidak menguntungkan FDR di Surakarta inilah yang menjadi pemicu perselisihan antara tentara yang pro-Amir dengan tentara yang pro pemerintah. Penghapusan Divisi IV diubah menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) dengan Panglima Kolonel Sutarto. Komando pertempuran ini terdiri dari lima brigade dengan 20 batalion.

Seandainya program RERA berjalan, maka golongan Front Demokrasi Rakyat (FDR) adalah golongan yang paling dirugikan, karena FDR telah membina dan memasukkan orang-orang yang pro FDR dalam pucuk pimpinan dalam angkatan perang Indonesia. Kebijakan RERA tentang rasionalisasi ini dianggap akan memperlemah Republik Indonesia dan oleh karena itu kebijakan ini ditentukan dari orang-orang maupun golongan yang menentang kebijakan tersebut mencari kepemimpinan politik pada FDR yang merupakan satu-satunya golongan politik yang militan menentang politik pemerintah.³⁰

Akhir bulan Agustus, kondisi keamanan di Surakarta semakin panas, yang disebabkan penculikan para pemimpin-pemimpin dari tentara dan dari badan perjuangan. Selain permasalahan penculikan, muncul masalah penting yang lain mengenai soal tuntutan para opsir yang diculik, semakin meningkatkan pertentangan antara politik kanan kotra kiri dan usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Penculikan para opsir atau pimpinan-pimpinan tentara dipusatkan di Srambatan, depan Stasiun Balapan. Anak buah dari opsir-opsir tersebut menuntut komandannya kembali, sehingga mereka mengadakan serangan terhadap Markas Tentara Hijrah (Pasukan

Siliwangi) di Srambatan mulai siang sampai sore hari. Pertama, opsir-opsir tadi mengumumkan mengadakan latihan besar-besaran di seluruh Kota Surakarta, namun setelah tiba di markas Pasukan Siliwangi yang hijrah, di Srambatan, lalu kemudian para opsir-opsir tersebut diberi komando menyebar dan mengepung markas tadi dengan senjata lengkap. Pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari, pasukan Siliwangi juga mengadakan perlawanan terhadap serangan tersebut. Hal itu mengakibatkan jatuhnya korban dari ALRI maupun dari Tentara Hijrah. Kejadian itu tercatat pada bulan pertengahan September 1948. Penyerbuan Asrama Srambatan Surakarta yang penuh dengan anggota Siliwangi yang sedang hijrah itu, terprovokasi FDR. Namun penyerbuan tidak terlalu berakibat fatal, karena pasukan Hijrah Siliwangi telah terlatih keterampilannya. Pertempuran membawa banyak korban di kalangan penyerbu sendiri, yang ternyata adalah pasukan ALRI yang diinfiltrasi oleh FDR/PKI sebelumnya.³¹

3. Daerah Surakarta Darurat Militer

Menghadapi situasi di kota Surakarta yang sedang kacau, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah harian menyatakan, bahwa APRI adalah alat negara dan penjamin kedaulatan negara. Serangan terhadap alat negara akan dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara, dan selanjutnya atas saran dari Panglima Besar kepada Presiden RI selaku panglima tertinggi, setelah berunding dengan Kepala Staf Operasi Kolonel A.H. Nasution, pada tanggal 16 September 1948 malam bersama Komandan Gatot Soebroto memutuskan satu-satunya jalan menyelesaikan perang saudara di Surakarta adalah menempatkan pimpinan yang tegas.

Presiden Soekarno menyetujui dan kemudian mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Surakarta yang berwenang atas semua alat negara serta berhak sepenuhnya menjalankan tugas-tugas Dewan Pertahanan Negara. Bertepatan dengan kedatangan Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto di Surakarta pada 18 September 1948, mulai terdesaknya pasukan FDR/PKI dalam pertempuran di Surakarta.

PKI kemudian melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan itu selanjutnya memberi kejelasan bagi Kolonel Gatot Soebroto bahwa insiden yang terjadi di Surakarta didalangi oleh PKI. Tindakan pertama kali dilakukan Gubernur Militer adalah menginstruksikan semua kekuatan bersenjata di Surakarta menghentikan tembak-menembak selambat-lambatnya tanggal 20 September 1948 jam 24.00 Wib dan keesokan harinya semua komandan pasukan yang saling bermusuhan harus melaporkan diri, dan mereka yang tidak melapor akan dianggap pemberontak. Keadaan di kubu FDR/PKI adalah melakukan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Sumarsono, seorang pemuda pimpinan Pesindo, Kolonel Joko Suyono, Komandan Brigade XXIX Letnan Kolonel Dachlan

Perebutan kekuasaan itu didukung oleh kesatuan-kesatuan dari Brigade XXIX, bagian TNI yang telah masuk ke dalam kekuatan tempur FDR/PKI. Pendukung tersebut mengangkat Gubernur Militer, Komandan Komando Militer Daerah, dan Residen baru yang berasal dari FDR/PKI 32. Presiden Soekarno setelah itu menyatakan bahwa PKI Muso telah mengadakan kup dan mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun yang dipandang sebagai permulaan merebut seluruh Pemerintah RI dan Presiden Soekarno juga menginstruksikan untuk segera merebut Madiun dari perampasan FDR/PKI.

Pernyataan tegas Presiden Soekarno tersebut disusul dengan instruksi Panglima Besar Soedirman tanggal 19 September 1948 yang berintikan menetapkan Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur, menunjuk Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah, serta menugaskan Brigade Sadikin untuk menyerbu Madiun dan menghancurkan PKI Muso. Perintah Presiden Soekarno untuk secepat mungkin merebut kembali Madiun dan instruksi Panglima Besar Soedirman dibahas lebih lanjut dalam rapat Dewan Siasat Militer pada 20 September 1948. Pada sidang tersebut ditekankan agar operasi penumpasan oleh APRI itu dilaksanak secepat mungkin karena bila tidak, Belanda akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan intervensi milieternya. Kecepatan operasi militer

untuk merebut kembali Madiun berarti kemenangan berad ditangan kita. Kepala Staf Operasional Kolonel A.H. Nasution sanggp untuk merebut Madiun dalam dua Minggu, dan kemudian menjabarkan tugas strategis itu dalam rencana-rencana operasi.

Ada tiga sasaran operasi yang telah ditetapkan, yaitu merebut kembali Madiun, Purwodadi, dan Pacitan, dengan Madiun sebagai sasaran utamanya. Kelanjutan keputusan Dewan Siasat Militer itu berjalan sangat cepat. Panglima Besar beserta Panglima Pertahanan Jawa Tengah Kolonel Bambang Soegeng pad tanggal 21 September 1948 datang ke Surakarta menyampaikan perintah dan memberi penjelasan operasional pelaksanaan perebutan kekuasaan kembali wilayahg Madiun.

Usaha penumpasan pemberontakan PKI tersebut, Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto dibantu pasukan tempur dari Divisi Siliwangi seitar 3 Brigade, yaitu empat batalion Brigade Siliwanti I di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kusno Utomo yang bergerak ke utara Surakarta melalui poros Surakarta-Kalioso-Gemolong untuk merebut sasaran utama Purwodadi. Tiga Batalion Brigade Siliwangi II di bawah pimpinan Letan Kolonel Sadikin bergerak dari barat dengan poros utama berada di Surakarta-Karanganyar-Tawangmangu- Sarangan, Plaosan, Magetan untuk merebut sasaran utama Madiun. Dua Batalion Brigade Siliwangi III di bawah pimpinan Mayor Nasuhi yang bergerak melalui poros Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Baturetno, Giriwoyo danPunung untuk merebut sasaran utama Pacitan.³³ Suasana Kota Solo menjadi berubah yaitu tidak ada lagi cemoohan terhadap pasukan Siliwangi dan meneriakkan umpatan pada FDR.

Pemberitaan media melalui RRI Yogyakarta gencar mengabarkan pasukan Siliwangi di bawah pimpinn Letkol Sadikin berhasil merebut kembali Madiun pada tanggal 30 September 1948 pukul 16.00 dari tangan Komunis, kurang dua minggu sejak menerima perintah pada 21 September 1948. Gubernur Militer,³⁴ wilayah Surakarta, Semarang, Pati kemudian memerintahkan Brigade Siliwangi I untuk kembali ke basisnya

di Yogyakarta dan Magelang. Operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun yang dilakukan Brigade Siliwangi bersama kesatuan TNI dan kesatuan-kesatuan lain yang tetap setia pada pemerintah RI berlangsung 72 hari. Terhitung sejak dimulainya perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 sampai tertangkapnya Amir Syarifuddin pada akhir November 1948 di Purwodadi.

VI. Pembentukan Lembaga Wakil Rakyat Kota Besar Surakarta

Setelah perjuangan menengahkan tentara Belanda yang ingin menguasai Kota Solo dan meredam pergolakan dengan adanya pemberontakan PKI Madiun. Akhirnya pemerintah pusat mengadakan pemilihan umum pertama kali, pada tahun 1955, terbentuklah lembaga wakil rakyat di kota Surakarta. Meski demikian pembentukan lembaga wakil rakyat masih bersifat sementara dengan nama DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) kota Besar Surakarta, melalui pemilihan umum.

Meski terdapat perbedaan pandangan tentang waktu yang pasti DPRDS dibentuk, tim pelacak hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta mengungkapkan kronologis kejadian setelah mencermati pelbagai temuan terpublikasi. Secara defakto sebenarnya pada tanggal 7 Agustus 1948, telah terbentuk lembaga wakil rakyat sesuai hominte dibakar para gerilya dan masyarakat. Pembakaran hominte diduga merupakan strategi melakukan provokasi pada dunia tentang kekejaman tentara Belanda dengan tujuan menciptakan image bahwa rakyat tetap mempertahankan kemerdekaan di Kota Solo.

Dalam sambutan pembukaan sidang pertama DPRDS38 di Solo, Walikota Jakarta Raya, Salamun, menyatakan dalam waktu enam bulan Kota Surakarta mempunyai satu Undang-undang pembentukan daerah otonom yang pertama-tama dihasilkan oleh pemerintah sendiri.

“Dalam waktu enam bulan itu Kota Surakarta mempunyai satu Undang-undang pembentukan ja’ni satu-satunja undang-undang

pembentukan daerah otonom jang pertama-tama dihasilkan oleh pemerintah kita sendiri (Badan Pekerja KNIP dan Kabinet). Meskipun undang-undang itu masih ada kekurangan-kekuranganja, akan tetapi dasar hukum jang dapat menjadi pegangan bagi pemerintah kota Surakarta sebagai daerah otonom menurut azas-azas negara kita telah ada”

Lebih lanjut Salamun menegaskan

“Disampingnya persoalan hukum itu masih ada seribu satu persoalan sebagai akibat revolusi nasional dan revolusi sosial yang bergolak di masyarakat Surakarta. Waktu dan tempatnya tak ada disini untuk membentangkan persoalan-persoalan ini secara mendalam dan satu per sat. Cukup kiranya jika saya terangkan disini, bahwa akibat-akibat itu dapat dinalaisir dan diatur lebih ringan semenjak pemerinta kota Surakarta mempunyai dasar hukum itu.”

Temuan lain yang menarik yakni pendirian lembaga wakil rakyat terjadi pada 17 Januari 1953. Pelacakan mengenai hal itu hingga sekarang belum ditemukan pada tanggal tersebut, residen Salamoen berpidato pada ulang tahun berdirinya DPRDS Kota Besar Surakarta. Dalam sambutan pada pidato dua tahun berdirinya DPRDS, Salamoen menyinggung beberapa hal antara lain tentang, asas Pancasila

“Didalam konstruktieve fase seperti sekarang ini dalam mana kita hendak merombak susunan lama mendjadi struktur baru berdasarkan azas-azas Pantjasila, maka berbeda dengan fase ideologis dalam mana kita tjukup dengan menunjukkan garis-garis besarnja sadja, kita sekarang memerlukan suatu planning setjara techniek jang teliti sampai kepada pelaksanaan detail-detailnya.”

BAB IV

PEROLEHAN SUARA

PEMILIHAN ANGGOTA DPR DAN DPRD

DARI MASA KE MASA

Inilah awal pemerintahan yang dikehendaki sebagian rakyat setelah diadakan pemilihan umum (Pemilu) pertama usai kemerdekaan bangsa diraih. Perjalanan panjang menuju terbentuknya negara demokratis dengan mengedepankan azas persatuan dan kesatuan bangsa menjadi ciri khas Negara Republik Indonesia. Setelah pemilihan 37 anggota konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955, anggota komite menyepakati perlu diadakan pemilihan umum (Pemilu) memilih wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap periode berdasar waktu yang ditetapkan.

Banyak hal terjadi dalam masa pergantian Pemilu dari tahun ke tahun. Pada awal pemilihan umum pertamakali diadakan dengan jumlah partai politik lebih dari lima perwakilan, hingga pengurangan jumlah partai politik menjadi dua dengan penambahan satu utusan dari golongan karya pada tahun 70-an mewarnai peta politik setelah Orde Lama (Orla) diganti Orde Baru (Orba). Tidak hanya terjadi perubahan konstestasi partai politik di tingkat perwakilan DPR pusat, tetapi juga di tingkat kelembagaan wakil di daerah. Berikut peta politik dengan multi partai peserta Pemilu di daerah, DPRD Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun. Untuk gambaran tentang peta politik dalam pemilu, perlu kiranya ditampilkan perolehan jumlah suara di tingkat nasional.

Berikut paparan kondisi peta politik ditulis Aswab Nanda Pratama, dapat terlihat dengan jelas perubahan perkembangan konstestasi pemilihan dari tahun ke tahun. Dalam paparan hasil pemilihan umum yang diterbitkan melalui media massa terlihat dengan jelas perjalanan pesta demokrasi sejak pemilu pertamakali diadakan pada tahun

1955. Tidak hanya perubahan peta konstalasi perebutan kekuasaan memperebutkan perolehan suara perorangan, tetapi juga tampak kepentingan politik yang berada dibalik organisasi peserta pemilu dengan wujud partai politik. Mari kita simak perubahan peta politik dalam 'pertikaian' antarkubu partai politik peserta pemilu berikut struktur kelembagaan di DPR maupun DPRD.

Struktur Kelembagaan DPR dan DPRD

Pesta demokrasi lima tahunan akan kembali berlangsung pada tahun 2019. Suhu politik mulai menghangat. Banyak catatan dari perjalanan pesta demokrasi di Indonesia, dengan segala ceritanya. Berikut rekam jejak pemilu di Indonesia dimulai dari Pemilu 1955. Paparan berikut merupakan gambaran perolehan jumlah kursi berdasar suara pada pemilihan anggota DPR dan DPRD yang pernah dilakukan di Indonesia. Pada pemilu pertamakali dilakukan di Indonesia 29 September 1955 ketika pemerintahan Soekarno menjabat sebagai presiden, memilih anggota DPR dan Konstituante.

Sebanyak 260 kursi diperebutkan untuk mengisi kursi sebagai anggota DPR, dan 520 anggota Konstituante. Selain itu, ditambah 14 wakil golongan minoritas diangkat oleh pemerintah. Pemilihan dilakukan 29 September 1955. Berikut nama peserta pemilu dan hasilnya:

Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPR Periode 1955

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 57 kursi
2. Masyumi, memperoleh 57 kursi
3. Nahdlatul Ulama (NU) memperoleh 45 kursi
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh 39 kursi
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) memperoleh 8 kursi
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) memperoleh 8 kursi
7. Partai Katolik memperoleh 6 kursi

8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) memperoleh 5 kursi
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) memperoleh 4 kursi
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) memperoleh 4 kursi
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) memperoleh 2 kursi
12. Partai Buruh memperoleh 2 kursi
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) memperoleh 2 kursi
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) memperoleh 2 kursi
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) memperoleh 2 kursi
16. 1 Murba memperoleh 1 kursi
17. Baperki memperoleh 1 kursi
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro memperoleh 1 kursi
19. Grinda memperoleh 1 kursi
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Perma) memperoleh 1 kursi
21. Persatuan Dayak (PD) memperoleh 1 kursi
22. PIR Hazairin memperoleh 1 kursi
23. Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI), tidak memperoleh kursi
24. AKUI, 1 kursi Persatuan Rakyat Desa (PRD): memperoleh 1 kursi
25. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) memperoleh 1 kursi
26. Angkatan Komunis Muda (Acoma) memperoleh 1 kursi
27. R Soedjono Prawissoedarso memperoleh 1 kursi

2. Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRDS Periode 1955-1955

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai derivat dalam sistem pemerintahan merupakan bagian dari wakil rakyat berkedudukan di daerah tingkat I dan tingkat II ditingkat provinsi, kotamadya maupun kabupaten. Sejak awal pembentukan anggota lembaga perwakilan rakyat terdapat di setiap provinsi, kota dan di kabupaten dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati di setiap daerah pemilihan

Meskipun diikuti oleh 23 partai politik peserta pemilu, anggota DPRDS Kota Solo, sejarah tidak mencatat jumlah perolehan suara anggota DPRDS yang menduduki jabatan sebagai anggota dewan. Berikut nama dan partai politik peserta pemilu pada tahun 1955. Nama-nama anggota DPRDS dan partai politik yang ikut dalam Pemilu. Bila dilihat dari perolehan hasil pemilu, dapatlah dimengerti bahwa struktur organisasi kelembagaan partai politik di era pemilu 1955, tampak jelas bahwa perhitungan perolehan suara orang-perorangan, bukan menjadi dasar pijak wakil rakyat yang ingin maju menjadi anggota DPRDS Kota Surakarta. Penunjukan seseorang menjadi anggota dewan perwakilan rakyat (DPRDS) di daerah menurut Salamoen, merupakan pengabdian warga masyarakat kepada bangsa dan negaranya. Lebih lanjut Salamoen menegaskan bahwa Kota Besar Surakarta telah memiliki stensel pemerintahan yang memungkinkan daerah menjadi suatu daerah otonom dengan susunan pemerintahan yang dijalankan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Kota Besar Surakarta telah mempunyai stensel pemerintahan yang memungkinkan daerah itu menjadi suatu daerah otonom dengan susunan pemerintahannya dimana rakyat dapat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya, dengan melalui adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota tersebut. Akan tetapi itu tidak ada artinya jika kita tidak pandai selalu memperbaiki: 1) hidup dan penghidupan rakyat; 2) kebersihan dan keindahan kota, 3) kesehatan dan pendidikan umum

Berikut gambaran singkat Pemilu dari waktu ke waktu

No	Nama Periode	TAHUN JABATAN		KETUA DEWAN	
		AWAL	AKHIR	NAMA	PARTAI
1	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara DPRDS	16 Aug 1950	25 Mar 1955		
2	DPR hasil Pemilu I	26 Mar 1956	22 Jul 1959		
3	DPR setelah Dekrit Presiden	22 Jul 1959	26 Jun 1960		
4	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	26 Jun 1960	15 Nov 1965		
5	DPR GR Minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 Jun 1965	19 Nov 1966		
6	DPR GR Orde Baru	19 Nov 1966	28 Okt 1971		
7	DPR Hasil Pemilu ke-2	28 Okt 1971	1 Okt 1977		
8	DPR hasil Pemilu ke-3	1 Okt 1977	1 Okt 1982		
9	DPR hasil Pemilu ke-4	1 Okt 1982	1 Okt 1987		
10	DPR hasil Pemilu ke-5	1 Okt 1987	1 Okt 1992		
11	DPR hasil Pemilu ke-6	1 Okt 1992	1 Okt 1997	Sumarno	Solo
12	DPR hasil Pemilu ke-7	1 Okt 1997	1 Okt 1999		

13	DPR hasil Pemilu ke-8	1 Okt 1999	1 Okt 2004		
14	DPR hasil Pemilu ke-9	1 Okt 2004	1 Okt 2009		
15	DPR hasil Pemilu ke-10	1 Okt 2009	1 Okt 2014		
16	DPR hasil Pemilu ke-11	1 Okt 2014	1 Okt 2019		
17	DPR hasil Pemilu ke-12	1 Okt 2019'	1 Okt 2024		

Sambutan Walikota Djaarta Raya Sjamsuridjal



Salam dan bahagia saja sampaikan kepada seluruh penduduk Kota Solo dan sekitarnja. Apabila saja menguraikan riwayat Surakarta dalam waktu saja memegang pimpinan kota itu sebagai wali kota, dari bulan Oktober 1946 sampai penyerbuan koloniasme Belanda, maka uraian saja tidak tjukup djelas djika hanja saja bentangkan dalam suatu kata sambutan dalam buku peringatan ini.

“Lief en Leed” di Surakarta dan kesukaran-kesukaran jang harus saja atasi memang sangat beraneka warna tjorak ragamnja, dan pengalaman itu dapat memberi peladjaran jang sangat berharga dalam taktiek dan tjara mendjalankan pemerintahan, pun pula kesukaran-kesukaran itu memberikan tjukup pengetahuan tentang tabiat-tabiati manusia jang sewadjaranja.

Bukan di buku ini tempatnja untuk memberikan sedjarah Surakarta setjara pandjang lebar dan mendalam karena disini saja, atas permintaan hanja akan memberikan sekedar kenang-kenangan setjara selajang pandang. Karena itu, marilah saja mentjoba menganalisis dalam garis-garis besarnja kesulitan-kesulitan jang saja hadapi dan harus dipetjahkan.

Suasana Masjarakat

Masjarakat Suraarta jang ratusan tahun dalam pengaruh dan pimpinan suatu “stelsel” pemerintahan jang “kolonial-autokratis” harus dirobah dengan sekaligus mendjadi suatu masjarakat jang demokratis dengan susunan pemerintahanja jang demokratis pula. Sudah barang tentu keadaan seperti itu membawa kegontjangan dan “ontwrichting” dalam segala lapangan dan sendi-sendi masjarakat. Hanja djiwa jang

besar dan kreatif jang dapat melaksanakan pekerdjaan maha hebat serupa itu.

Didasarkan pada ilmu-ilmu hukum jang ada pada kita jang dilaksanakannja setjara progressief, maka dalam waktu enam bulan dapatlah tertjapai satu dasar hukum jang sesuai dengan azas-azas demokrasi dan norma-norma baru jang menjadi dasar negara kita.

Dalam waktu enam bulan itu Kota Surakarta mempunyai satu Undang-Undang pembentukan jakni satu-satunja undang-undang pembentukan daerah autonom jang pertama-tama dihasilkan oleh pemerintah kita sendiri (Badan Pekerdja KNIP dan Kabinet). Meskipun Undang-undang itu masih ada kekurangan-kekuranganj, akan tetapi dasar hukum jang dapat menjadi pegangan bagi pemerintah Kota Surakarta seagai daerah autoom menurut azas-azas negara kita telah ada

Disampingja persoalan hukum itu masih ada seribu satu persoalan sebagai akibat revolusi nasional dan revolusi sosial jang bergolak di masyarakat Surakart. Waktu dan tempatja tak ada disini untuk membentangkan persoalan-persoalan itu setjara mendalam dan satu per satu. Tjukup kiranja djika saja terangkan disini, bahwa akibat-akibat itu dapat dinalisir dan diatur lebih ringan semendjak pemerintah Kota Surakarta mempunjai dasar hukum itu.

Hasil Pekerdjaan

Susunan pemerintahan dan azas-azas negara sebagai diuraikan diatas tadi telah dapat diwujudkan kemampuan masjarakat Surakarta untuk menjadikan menjadi suatu masjarakat jang demokratis dan mempunyai susunan pemerintah sesuai dengan azas-azas negara Republik Indonesia telah dapat tertjapai pula. Akan tetapi hasil-hasil itu masih harus disempurnakan sehingga semua golongan dalam masjarakat Surakarta itu dapat menginsjafi dan mengikuti perubahan-perubahan besar dalam hidupnja sehari-hari.

Golongan kedua radja dengan seluruh pegawai-pegawanya pun harus dapat ditempatkan dalam susunan pemerintahan jang baru itu, dan kesempurnaan itu hampir-hampir dapat terjapai, akan tetapi kekuatan kolonialisme Belanda menjerbu daerah republik kita dan merusak apa jang telah kita susun dan mengindjak-indjak hak-hak azasi manusia dan perikemanusiaan.

Akan tetapi Tuhan jang Maha Esa menghendaki lain dari pada mereka jang ingin mengembalikan kolonialisme di tanah air kita. Dengan kembalinya republik kita, berdirilah pula tegak kembali tata negara dan masyarakat jang bersendi atas dasar hukum jang sesuai dengan azas-azas negara kita. Maka sekarang ada ditangan saudara-saudaralah jang memegang pemerintahan di Surakarta itu untuk meneruskan terjapainya tjita-tjita negara agar masyarakat kita jang adil dan makmur. Lantas apa jang harus kita kerjakan selanjutnja?

Kota Besar Surakarta telah mempunyai stesel pemerintahan jang memungkinkan daerah itu menjadi suatu daerah otonom dengan susunan pemerintahannya dimana rakjat dapat ikut serta dalam mendjalankan roda pemerintahan di daerahnja, dengan melalui adanya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah di kota tersebut. Akan tetapi itu tidak ada artinja djika kita tidak pandai selalu memperbaiki, 1) hidup dan penghidupan rakjat, 2) kebersihan dan keindahan kota, 3) kesehatan dan pendidikan umum.

Supaja djangan begitu tergantung dari pemerintah provinsi, hendaknya diusahakan terdapatnja sebanjak-banjaknja mata penghasilan dari daerahnja sendiri. Untuk dapat melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan itu hendaknya pemerintah diagi dalam 7 djawatan sebagai berikut:

1. Djawatan Pekerdjaan Umum
2. Djawatan Kesehatan Kota
3. Djawatan Kehewanan Kota

4. Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
5. Djawatan Sosial dan Perburuhan
6. Djawatan Perekonomian Rakjat
7. Djawatan Keamanan Kota

Sebagai penutup saja utjapkan do'a mudah-mudahan "Gusti Kang Murbeng Djagad" selalu melindungi dan memimin Daerah Surakarta supaja daerah itu tetap disuatu daerah jang tenteram dan makmur dimana segala-galanja dikuasai oleh keadilan.

Wassalam, Sjamsuridjal

SOLO DIWAKTU PERALIHAN PIDATO SOEBAKTI POESPONOTO



“OO, NIKI MEN DERENG”

November 1949, delegasi-delegasi Hatta/BFO berunding di Den Haag, bersiap-siap meninggalkan Kota Bengawan. Rapat-rapat segitiga, Local Joint Committee --delegasi RI-- delegasi Belanda di UNCI house, Purbajan. Diseling dengan pertempuran, pembersiah, steling-steling, pembumihangusan dan pentjulikan. Dalam pada itu anak-anak gerilja terus menerus merembes kedalam kota dengan diam-diam dan ditempat-tempat jang tak tersangka

pula. Barisan “Pengempur Dalam” oleh karenaja makin hari makin kuat. Jang patah tumbuh, jang hilang berganti, dengan berlipat ganda, laksana Adji Tjandrabirawa. Pemerintahan Balai Kota RI/Soeharja 0”schaduw bestuur” kata pihak Belanda-- makin berani menunjdjukkan romanja, lalu tampil kemuka dengan terang-terangan dan achirnja berpindah dari markasnja di Kampung Sewu ke Djalan Purbajan, sebagai Balai Kota RI, Surakarta bersemajam di atas puing rumah walko kota dulu jang kita bumi hanguskan. Sebagaimana pengempuran, sementara bulan lagi berpindahlah ia dari asuhan pemerintahan militer kota kepangkuan pemerintahan civiel, sampai sekarang

Tindakan kita jang pertama ialah menjusun daftar investaris: 120 buah bangunan pemerintah hantjur, 250 buah rumah rakjat musnah, djalan-djalan di beberapa tempat sepanjang 20 Km rusak, 16 djembatan hantjur atau lenjap sekali, perkakas-perkakas pekerjaan umum, kendaraan-kendaraan dan alat-alat kaontor rusak atau hilang tidak keruan, sampah bertimbun-timbun terserak dimana-mana, saluran-saluran air tertutup atau buntu sama sekali, demikian sekedar tjatatan dari “harta peninggalan” jang kita terima. Sungguh memilukan

hati tapi bila pandanganja dengan katja mata perdjoangan sungguh menggembirakan. Bukanlah runtuhan-runtuhan dari kerusakan-kerusakan itu sekian “saksi-saksi bisu” jang selama mengisahkan betapa hebatnja dan seremnja perlawanan putera dan puteri Solo selama 8 bulan pendudukan itu? Hal mana -sebagai Kolonel Ohl menjatakan kepada Overste Slamet Riyadi almarhum- tidak ada taranja diseluruh Djawa Tengah. Djadi kita boleh merasa puas djuga. Memang dulu kita bermbojan: menang dulu, llainnja diurus belakang.

Inilah hanja berlaku atas “warisan lahir”, sedangkan “warisan batin” tidak menggembirakan sama sekali, dipandang dari sudut apapun djuga. Disatu fihak semangat menang perang jang berlebih-lebihan dan dilain fihak suasana kekuatiran, kebimbangan dan kelesuan, keadaan mana kadang-kadang dikatjaukan lagi oleh beberapa orang bekas alat kekuasaan atau setengah non, dan co atau setengah co, golongan pedjoang, setengah pedjoang dan pembontjeng-pembontjeng, aliran-aliran pro dan contra Swapradja, ditambah pula kegontjangan-kegontjangan dan kegelisahan sebagai akibat kehilangan rumah dan harta bendanja beserta mata pentjahariannja. Dan seribu satu matjam kesukaran lagi jang kesemuanja menuntut penjelaesaian jang tjepat, tegas dan adil “demi perikemanusiaan dan keadilan sosial”, sebagaimana selalu ditekankanja.

Pemerintah kota dengan DPD dan DPR-nja sibuk berapat, berunding dan berfeeling, walhasil ditetapkan politiek beleidnja, jang bermaksud bahwa stabilitasi baik lahir maupun batin akan dilaksanakan seketika kalau perlu dengan tindakan-tindakan darurat dan hanja untuk sementara roda pemerintahan harus berputar seluruhnja. Pemerintah kota akan senantiasa ambil inisiatief, mendahulukan pelaksanaan daripada penjempurnaan agar supaja dapat mengasi suasana kebimbangan dan keadaan jang serba katjau itu.

Walaupun sebagai misal jang benar-benar terjadi, wali kota (dan DPD) berkendaraan andong untuk tournenja, sekolah-sekolah ditempatkan di los-los darurat dan di kebun-kebun ala “saniOneketan”

dan di kampong-kampong di hidupkan kembali apa jang dituduhkan sebagai “heerendienst” tapi sebenarnja “gotong rojong -istilah kampong-“sepasaran” dan sebagainja, namun roda pemerintahan berputar terus dengan lagak “all is running well”

Terhadap faham dan aliran jang bersimpang siur, maka politiek beleid tadi memakai misal demikian: sebagai pedoman kita semua sudah ditakdirkan Tuhan berada dalam satu perahu, jaitu “Bahtera R.I”. Marilah sekarang kita bekerdja masing-masing menurut bakat dan ketjakapannja, djangan banjak banjak menengok ke belakang, untuk menjelamatkan bahtera kita dan melandjutkan djalannja. Sebagai anak buah satu perahu, kita adalah sehidup semati, artinja kita timbul bersama-sama dan tenggelam bersama-sama, tiada jang terketjukupan Balai Kota, tentang pangkat, tingkatan dan gadji buat sementara diminta djangan dipersoalkan.

Demikian sang bahtera berangkat sudah, makin mendjauh dari partai rupa-rupanja makin dirasakan, “senasib sepanggungan” tadi, tinggal sekarang mendjawab pertanyaan kemana harus ditunjukan haulannja. Tudjuan umum sudah barang tentu ke Pantjasila, tapi buat daerah autonom Balai Kota -sejak 4 Djanuari 1951 berdasar undang-undang No. 16 tahun 1950 disebut “Kota Besar” -Surakarta, maka politiek ekonomis beleid ke-balaikotaan ada tudjuanja jang khusus. Jaitu harus disedari daja-daja dan bakat-bakat istimewa jang terdapat di kota Surakarta dan bilamana keistimewaan-keistimewaan itu kita perembangkan sebaik-baiknja, maka kedudukan daerah kota dapat unggul, sebaliknya bila faktor-faktor tadi kita abaikan, maka paling untung kemadjuan biasa sadja jang dapat kita tjapai sedangkan merosotnja kedudukan bila tak dipara keistimewaan-keistimewaan tadi sangat mungkin.

Tegasnja, pertama kota Solo termasukhur sebagai pusat kebudajaan Djawa asli hal mana merupakan daja penarik. Tamu-tamu jang datang barang tentu menguntungkan perdagangan dan perusahaan di kota sini. Maka dari itu sudah selajaknja pemerintah kota memadjukan,

setidaknja membangun kembali, objek-objek dan hasil-hasil kebudajaan jang apa dikatakan disini “ben Sala ora ana” itu sudah tentu dengan mengingat aliran zaman sekarang. Sesuai dengan kedudukannja sebagai pusat kebudajaan dan menilik besarnja potensi dilapangan perguruan, baik jang mengenai guru-gurunja, maupun jang mengenai murid-muridnja maka sudah selajaknja kota Solo dijadikan kota sekolahan dan kota universiteit. Berhubung dengan itu maka sudah tepat sekali usaha panitia baru ini -jang diakui oleh bapak wali kota Moh Saleh sekarang ini -kearah didirikannja universiteit negeri di Kota Bengawan. Bagaimana djuga djalannja -walaupun masih berwudjud rentjana- Solo dimasa datang harus menjadi pusat dimana orang dapat menunut ilmu matjam apa sadja jang dikehendaki, dan gedung-gedung sekolah, asrama-asrama, pondok-pondokan, perpustakaan wadjib ada lengkap modern, mudah-mudahan didapat dan murah.

**Sambutan Residen Salamoen⁴⁰
Pada Peringatan 2 Tahun
Berdirinya DPRDS Kota Besar Surakarta
Tanggal 17 Djanuari 1953**



Saudara Ketua DPRDS Kota Besar Surakarta

Para hadirin sekalian jang terhormat

Bertepatan dengan peringatan 2 tahun berdirinya DPRDS Kota Besar Surakarta, maka kesempatan ini terlebih dahulu saja pergunakan untuk mengucapkan selamat kepada saudara ketua beserta para anggota seluruhnja.

Pula saja tidak lupa untuk menjampaikan utjapan terimakasih atas segala hasil usaha DPRDS Kota Besar Surakarta selama 2 tahun jang pada

hakekatnja mentjerminkan segala keinginan rakjat jang berhassrat mengembangkan keadaan daerah dan melaksanakan tjita-tjita mendemokrasikan pemerintah daerah

Didalam konstruktieve fase seperti sekarang ini dalam mana kita hendak merombak susunan lama menjadi struktur baru berdasarkan azas-azas Pancasila, maka berbeda dengan fase ideologis dalam mana kita tjukup dengan menunjukkan garis-garis besarnya saja, kita sekarang memerlukan suatu planning secara techniek jang teliti sampai kepada pelaksanaan detail-detailnja.

Orang harus sudah dapat menjorter bahan-bahan, organismen dan culturwaarden dari bentuk susunan lama jang masih bisa dipergunakan nanti. Orang harus sudah dapat memiliki suatu project gambaran struktur seperti ditjita-tjitakan. Dan orng harus sudah dapat mengantur cara dan trace dalam melaksanakannja.

Saudara ketua dan hadirin

Justru karena belum adanja itu semua atau lebih tepat, justru oleh karena pendapat kita belum bertemu dan bersatu dalam tiga soal tadi jang akibatnja sering menimbulkan conflicten baik negatief maupun positif; ditambah dengan pengaruh tenaga reaksi dari luar, maka tidak djarang kita harus mengetahui kurang lantjarnja usaha-usaha pembangunan

Kita mengetahui bahwa apa jang disebut mendemokratiskan pemerintah daerah, pada hakekatnja adalah mendjungkir-balikkan pemerintah daerah jang ada.

Bukankah pemerintah daerah jang ada ini berdasarkan tradisi lama, berpangkal pada azas “rakjat guna pemerintahan dari rakjat, oleh rakjat dan untuk rakjat, sehingga tudjuan harus dibelokkan 180 deradjat.

Adalah perlu sekali iinsjafi bahwa dalam transformasi jang maha hebat itu, tidaklah tjukup dengan adanja perubahan-perubahan dalam factor djiwa (geestelijke waarde). Membagi habis (opdelen) segala tugas pemerintah central jang ada di daerah kepada pemerintah autonom jang bersifat colegial itu, belum merupakan djaminan berkembangnja demokrasi murni

Pendapat setengah orang, bahwa demokrasi dalam pemerintahan daerah sudah terlaksana sebaiknja, djika pihak DPRDS dan kepala daerah dimana-mana sudah dapat berdampingan, adalah pendapat jang simplisstisch, jang selama belum ada kesatuan pendapat dalam faktor djiwanja demokrasi, hanja akan menghasilkan feodalisme jang kolegial

Seorang sardjana pernah mengatakan, bahwa keluhuran budi bangsa Indonesia terletak pada penghormatan diwujudkan dalam bahasa Jawa jang digambarkan sebagai “Guru, Ratu Wong Tuwo Loro”

Penghormatan terhadap orang tua sebagai dasar dari *verbied* ada pada bangsa kita. Guru yang dimaksudkan dalam peribahasa tadi telah jarang lagi dipakai. Jiwa yang ada dalam hubungan “Guru dan Rtu” secepat mungkin harus beralih menjadi jiwa kerakjatan, yaitu jiwa pengabdian dan pemerintah terhadap kepada rakyat

Saudara Ketua

Inilah yang saja maksudkan disamping menjelenggarakan fungsionalisme demokratis kita harus mendemokratiser jiwa kita. Juga dalam demokrasi sering-sering jiwa “Kawulo Gusti” menjadi jiwa “Kolegial Gusti” yaitu jiwa *veelgodendom* atau musjrik, dengan akibatnya, perwakilan *djegal-djegalan*, sedang rakyat menunggu hasil pekerjaannya.

Saudara Ketua

Kami yang juga mempunyai tugas di luar kota ingin minta perhatian saudara-saudara mengenai hubungannya kota dengan desa. Mengenai pendirian kota dan desa, rupanya masih terasa adanya *wet van traagheid* akibat dari ajaran koligial *wetenschappen*, yang masih juga diterka oleh *letterknechten* bahwa seolah-olah terpisah dari desa dan kota-kota adalah merupakan tanah barat yang terselip “*westerse enclave*”

Pada hakekatnya kota adalah “Jantung dan Otak” dari daerah sekelilingnya. Dengan anggapan *westerse enclave* tadi, pendjadjah dan semua sekutu-sekutunya dengan mudah menguasai seluruh daerah, di dalam dan di luar kota dan di dalam segala lapangan, di lapangan kebendaan maupun di lapangan kerohanian.

Dengan adanya *sleur* lama ditambah dengan penetrasi baru dengan mudah kota-kota kita bisa merupakan “tanah asing” dimana bersukaria bangsa kita sebagai “*litte European*” atau sebagai “*little-little lainja*”, dengan tidak menghiraukan keadaan di luar kota, sesuai dengan fungsinya sebagai jantung dan otak.

Saudara Ketua

Sekian sambutan kami dengan doa mudah-mudahan DPRDS, Solo berhasil dalam usaha selanjutnya, sarana Solo tidak hanya pusat dari Surakarta, mungkin karena sejarahnya, juga merupakan pusat dari seluruh Indonesia. Djikalau garis kebudayaan dari bangsa kita adalah terhenti di Solo mungkin garis kebudayaan tadi akan dilanjutkan dari Solo pula

Menjambut 2 Tahun Usia DPRDS Kota Besar Surakarta
Oleh A Siswopranoto
Ketua DPRDS Kota Besar Surakarta

Pada tanggal 17 Djanuari 1953, ini DPRDS Kota Besar Surakarta mentjapai usia 2 tahun, semendjak dilantiknja oleh Gubernur Djawa Tengah pada tanggal 17 Djanuari 1951

Nasib DPRD kita ini meskipun tertiuip djuga oleh taufan mosi Hadikoesoemo jang mengakibatkan beberapa anggota DPRD menjatakan non actief, namun kegontjangan tak mengakibatkan bubarnja dan tetap berdjalan sampai detik ini.

Dalam 2 tahun perdjalan DPRD kita di Surakarta disamping kekurangan-kekurangan jang terdapat pada diri anggauta-anggauta, perselisihan- jang timbul antara DPRD dengan jang seharusnya bekerdja bersama, tjelaan-tjelaan dalam melaksanakan tugasnja, tetapi dengan berkat Tuhan, sekaliannja itu meskipun dengan susah pajah, dapat diatasinja

Salah satu djalan untuk melaksanakan azas demokrasi negara kita seluas-luasnja (seluas mungkin), maka Dewan Perwakilan Rakjat tidak hanya pada pusat pemerintahan sadja, tetapi di daerah-daerah pun diadakan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (DPRD).

DPRD-DPRD ini untuk melaksanakan tugas-tugas maka "Stelsel Desentralisasi Pemerintahan" mendjadi pokok terpenting, oleh karena dengan tak adanja stensel desentralisasi pemerintahan, maka DPRD tak akan bermanfaat pula bagi daerah-daerah dan kepentingan-kepentingan daerah jang harus langsung dipikirkan dan dilaksanakan (djika tak ada desentralisasi) akan terhambat djalannja, karena segala sesuatunja hanya tergantung dan bergantung pada pusat pemerintahan.

Djadi DPRD kita ini adalah suatu badan jang timbul (diadakan

karena azas demokrasi jang luas dalam pemerintahan jang berstelsel desentralisasi pemerintahan jang dinjatakan dalam UU Dasar (Sementara) dan dari dalam UU Organiknja (UU No.22 tahun 1948).

Untuk pembentukan DPRD maka berlaku peraturan pemerintah No.39 tahun 1950 jang melahirkan DPRD-DPRD. Sementara, karena anggauta DPRD belum terpilih oleh rakjat, tetapi hanya melalui organisasi-organisasi dan partai dan karena inilah; a) maka DPRD-DPRD Sementara ini disana-sini dipandang kurang memuaskan (tidak representatief), kurang mendapat perhatian dari rakjat, b) maka timbul mosi Hadikoesomo jang diterima oleh parlemen jang hampir-hampir mengontjangkan seluruh DPRD-DPRD 9dengan usul dibekukannja)

Tetapi oleh karena menurut keadaan-keadaan maka mosi Hadikoesoemo tak dapat dilaksanakan, meskipun gema mosi Hadikoesoemo tetap merasa dan terdengar. DPRD merupakan salah satu organ pemerintah daerah disamping DPD (Dewan Pemerintah Daerah) jang anggauta-angautanja terpilih oleh dan dari anggauta-anggauta DPRD diketahui oleh kepala daerah sebagai organ pusat dalam daerah. Dengan demikian DPRD sebagai badan legislatief (pembentuk peraturan-peraturan) dalam melaksanakan tuigasnja perlu faktor-faktor antarlain berkaitan dengan

1. kerjasama seerat-eratnja dengan DPD plus kepala daerahnja dalam melaksanakan segala sesuatu tugasnja. Disamping ini pun djuga bantuan-bantuan dari djawatan tak dapat diabaikan dalam membentuk sesuatu peraturan-peraturan
2. Bantuan rakjat. Perkembangan demokratisasi di tanah air kita semakin lama harus semakin njata menjadi jiwa tiap-tiap warga negara, dengan dapat menjalurkan sifat kedemokratisasian ini melalui saluran-saluran demokrsi, sebagai instansi-instansi pemerintah, dengan meliewati dewan perwakilanja, pendirian-pendirian dan buah-buah pikiran, perasaan dll, dari rakjat umum, inipun dapat memberikan bantuan jang esar dalam dewan perwakilan melaksanakan tugasnja.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

BANGGAR

Badan Anggaran

KETUA



BUDI PRASETYO, S.Sos M.A.P.

WAKIL



SUGENG RIYANTO, S.S

WAKIL



Drs. ACHMAD SAPARI, MM

WAKIL



Drs. TAUFIQURRAHMAN

ANGGOTA



TUGAS BADAN ANGGARAN

- Menyusun dan melaksanakan program kerja pelaksanaan APBD kepada Kepala Daerah dalam melaksanakan Rancangan APBD sebagai perantara kepada Kepala Daerah yang memuat kerangka Pembiayaan Daerah dan Anggaran
- Melakukan pengawasan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil realisasi Musren



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

BANMUS

Badan Musyawarah

KETUA



BUDI PRASETYO, S.Sos M.A.P.

WAKIL



SUGENG RIYANTO, S.S

WAKIL



Drs. ACHMAD SAPARI, MM

WAKIL



Drs. TAUFIQURRAHMAN

ANGGOTA



TUGAS BADAN MUSYAWARAH

- Mengajukan dan melaksanakan program kerja pelaksanaan APBD kepada Kepala Daerah dalam melaksanakan Rancangan APBD sebagai perantara kepada Kepala Daerah yang memuat kerangka Pembiayaan Daerah dan Anggaran
- Melakukan pengawasan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil realisasi Musren
- Melakukan pengawasan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil realisasi Musren
- Melakukan pengawasan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil realisasi Musren
- Melakukan pengawasan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil realisasi Musren



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

BAPEMPERDA

Badan Pembentuk Peraturan Daerah

KETUA



EKYA SRI HANANTO, SH MH

WAKIL



ROY SAPUTRA

ANGGOTA



YF. SUKASNO, SH



JAJANG DIMAYUNI A.A, SP



SIRARSONO, SH MH



EDDI NORAH SAFWI INDIA, SH



HAITANTI, SE



ETI DWIDA, SH MH



ABDI CHAFAR ISMAH, S.Si



YUMA SINDI BYANTI, SH



ANTONIUS YUGO PRADONO

TUGAS BAPEMPERDA

1. Melakukan koordinasi program pembangunan Kota yang memuat dalam suatu perencanaan, serta melaksanakan secara prioritas pembangunan lingkungan Perkotaan dan pedesaan yang terdapat dalam RPJMD dan RPJRW.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan Kota sesuai RPJMD dan RPJRW.
3. Melakukan koordinasi Perkotaan dan Perdesa (PKPD) yang merupakan unit kerja pembangunan lingkungan yang terdapat dalam RPJMD.
4. Melakukan pengkoordinasian, penyalangan, dan pemantauan kegiatan pembangunan Kota yang diarahkan kepada bentuk atau program untuk sebuah lingkungan/Perkotaan dan Perdesaan.

5. Mengikuti pembahasan mengenai Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Kota.
6. Melakukan koordinasi antara unit kerja pembangunan Kota yang berkaitan dengan lingkungan Perkotaan dan Perdesaan.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan Kota yang terdapat dalam RPJMD dan RPJRW.
8. Melakukan koordinasi antara unit kerja pembangunan Kota yang berkaitan dengan lingkungan Perkotaan dan Perdesaan.
9. Melakukan koordinasi antara unit kerja pembangunan Kota yang berkaitan dengan lingkungan Perkotaan dan Perdesaan.
10. Melakukan koordinasi antara unit kerja pembangunan Kota yang berkaitan dengan lingkungan Perkotaan dan Perdesaan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

BK

Badan Kehormatan

KETUA



YULIANTO INDRATMOKO

WAKIL



MUHAMMAD AL-AMIN, SE

ANGGOTA



SLAMET WIDODO, SH



ASIH SUNJOTO PUTRO, S.Si



Ir. MARGONO, MM

TUGAS BADAN KEHORMATAN

1. Meninjau dan Mengetahui/cek disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik.
2. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengalasan Pengalasan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat.
4. Melakukan kegiatan Badan Kehormatan atau hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2) kepada Rapat Paripurna.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

KOMISI I

Bidang Hukum dan Pemerintahan

KETUA



SUHARSONG, SH MH

WAKIL



HARTANTI, SE

SEKRETARIS



AGUS NURYANTO, S.PI

ANGGOTA



Drs. PABLIS BARYOTO



SLAMET WIDODO, SH



SUWANTO



LIM PURWANTO, SH



DINAH RETNA INDRASARI, A.MI



WIDY BARYANTO, SE, AK. CA



BENI HERMAWAN, S.PI



YUDA SINDU RIYANTO, SH

RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI I

1. Urusan staf Pembidang Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pembidang lainnya;
2. Urusan Staf Pembidang DPRD;
3. Urusan yang melaksanakan fungsi pengawasan;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;

6. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
7. Urusan Pemerintahan Bidang Peradilan;
8. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
9. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Keluarga, Umur, dan Pembangunan Perempuan;
10. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang keagamaan serta Pendidikan dan Pelatihan;
11. Kerjasama;
12. Urusan Pemerintahan Bidang Organisasi;
13. Sosial Politik;



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

KOMISI II

Bidang Perekonomian dan Keuangan

KETUA



HONDA HENDARTO

WAKIL



RODO INDRANI SARIWO INDAH, SH

SEKRETARIS



S. RONNY KAMTORO, SH

ANGGOTA



WINANTO, SH



DYAH RETNO PRATINI, S.Su N.L.Kem



TRI BUDO SETYO PITRO, A.MI



JUDO AGUNG RIWANTO



AGUS CHIDAR ISMAIL, S.SI



AGUS HASTUTI PANCASILA



D. MARSIMO, NIM

RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI II

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;

5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
8. Badan Usaha Milik Daerah.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

KOMISI III

Bidang Pembangunan

KETUA



YF SUKASNO, SH

WAKIL



ETY ISWORO, SH MH

SEKRETARIS



ABDIANTO KUSWINARNO, SH

ANGGOTA



SITI MUSLIKAH, S.Sos M.A.P.



YULIANTO INDRATMOKO



SUYATNO



BOY SAPITRO



NURIANI, SE



MIRADI SYARIFONI, ST



MUHAMMAD AL-AMRI, SE

RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI III

- | | |
|---|---|
| 1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan; | 5. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; |
| 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; | 6. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan; |
| 3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; | 7. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan; |
| 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; | 8. Penanggulangan Bencana; |
| | 9. Pemadam Kebakaran. |



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

KOMISI IV

Bidang Kesejahteraan Rakyat

KETUA



JANJANG SUMARYONO A.J., S.P.

WAKIL



ANNA BUDIARTI, S.P.A.

SEKRETARIS



AGUS SETIAWAN, S.H.

ANGGOTA



ELIZABETH PURBANINGATI



EKY SIDI BANANTO, S.H., M.H.



GINDA FERACHTRIDAWAN, S.E., M.Si.



TITIK NURHAYATI, S.H.



TERTY MAHARANI GINAWATI, S.Tr.



H. ASIH SUNJOTO PUTRO, S.Si.



ANTONIUS YOGO PRADONO

RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI IV

- | | |
|---|---|
| 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; | 7. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; |
| 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; | 8. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; |
| 3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; | 9. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; |
| 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pembudayaan Perempuan dan Perbudayaan Anak; | 10. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; |
| 5. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB; | 11. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; |
| 6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; | 12. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsifan; |
| | 13. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan. |

NAMA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2004 DAERAH PEMILIHAN I



Nama : **Drs. BANDUNG Joko S, SH**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sukoharjo, 8 September 1961
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sawo 3 No 3 Karangasem Ska.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : III
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : Partai Golkar
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 1,243
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **Ir. BIMO PUTRANTO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 1 Mei 1973
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Nanas I/10 Jajar, Laweyan, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Katholik
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : III
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 2
 Perolehan Suara : 2,910
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **WINARNO SAPUTRO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 13 September 1966
 Alamat Tempat Tinggal : Klaseman RT 02/I Laweyan Ska.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : III
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 1,071
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **YULI PURWANINGSIH**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 12 Juli 1977
 Alamat Tempat Tinggal : Bibis Baru RT 03/XIII Nusukan, Solo
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Kristen
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Anggota Komisi : III
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PDS
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 691
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :

NAMA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2004 DAERAH PEMILIHAN II



Nama : **ABDULLAH A. ASSEGAF**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 9 November 1962
 Alamat Tempat Tinggal : Mertodranan RT 03/III Pasarkliwon, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : II
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PAN
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 2,098
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **ENDANG KUSUMA A.**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 2 Desember 1952
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Saharjo SH No. 6, RT 02/VI Kp Baru Solo
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Kristen
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : II
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PDS
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 799
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **JOKO HARYADI, SH**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 11 Februari 1964
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Brotojoyo No 26, Dasung Tengah, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : I
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : PAN
 No. Urut Calon : 2
 Perolehan Suara : 513
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **KRMH SATRIYO HADINAGORO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 10 April 1946
 Alamat Tempat Tinggal : Baluwarti RT 01/I Pasarkliwon Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : III
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 2,234
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **Dipl Ing H. QUATLY A. ALKATIRI**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Desember 1960
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Wiropaten No 2 Pasar Kliwon, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : II
 Pendidikan Terakhir : DIII
 Partai Politik : PKS
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 2,489
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **SYAHDAN NOOR**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 9 Maret 1963
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Harjodipuran RT 04/V Joyosuran, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi :
 Pendidikan Terakhir : D III
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 4
 Perolehan Suara : 917
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **RENI WIDYAWATI, Amd Par, SE**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 3 September 1975
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Nanas Raya No 3, RT 01/VII Jajar
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Anggota Komisi : IV
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : Partai Demokrat
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 1,825
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **TANDIO WIBOWO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 31 Agustus 1949
 Alamat Tempat Tinggal : Kp. Dukuh RT 04/VIII Semanggi, Sob
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Katholik
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : IV
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 2
 Perolehan Suara : 994
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **Ir. HARIADI SAPTONO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Agustus 1965
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Dworowati No.6 Kartotiyasan Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Katholik
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : I
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 3
 Perolehan Suara : 658
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **HM YUSUF HIDAYAT**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 7 Oktober 1954
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Veteran No 208, Serengan, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : Wakil Ketua DPRD
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : Partai Golkar
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 1,865
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :

NAMA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2004 DAERAH PEMILIHAN III



Nama : **ALQAF HUDAYA, SH**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 22 Agustus 1956
 Alamat Tempat Tinggal : Ngadisono RT 05/XIV, Kadipiro, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : Wakil Ketua DPRD
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : PAN
 No. Urut Calon : 2
 Perolehan Suara : 900
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **BAMBANG WIJAYANTO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, November 1953
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Kutai Tengah II No 19 Sumber, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Katholik
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : IV
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 2
 Perolehan Suara : 2,110
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **BEKTI KAREBET**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Boyolali, 27 Juli 1950
 Alamat Tempat Tinggal : Mangkubumen RT 03/XII Banjarsari, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : IV
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : Partai Golkar
 No. Urut Calon : 6
 Perolehan Suara : 319
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **M. EDY JASMANTO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen 20 Oktober 1967
 Alamat Tempat Tinggal : Sendangmulyo RT 5/18 Kadipiro, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : IV
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PPP
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 339
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **EFENDI SIAHAAN,SH**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Desember 1963
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Nias II No 7, RT 03/XIV Gilingan Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Kristen
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : IV
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : PDS
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 1,555
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **MARYUWONO, SH**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 19 April 1967
 Alamat Tempat Tinggal : Kusumodiningratan RT 04/V Keprabon
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : I
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 7
 Perolehan Suara : 1,087
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **MUHAMMAD FAJRI**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 20 Desember 1970
 Alamat Tempat Tinggal : Karangasem RT 03/V Laweyan, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : III
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PKS
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 1,441
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **PURWANTO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 7 Februari 1952
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Kutai Barat IV, No 8 Sumber, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : I
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : Partai Golkar
 No. Urut Calon : 2
 Perolehan Suara : 787
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **H. SYAMSUDIN DAHLAN**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 2 Desember 1946
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sam Ratulangi, No 58C Manahan
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : IV
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PAN
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 2,071
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **PURWONO, SH**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Purwokerto, 7 Desember 1964
 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Teratai I No 41 Mangkubumen, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Katholik
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : Ketua Komisi I
 Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 3
 Perolehan Suara : 1,643
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **SRI HARTONO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 28 Mei 1948
 Alamat Tempat Tinggal : Sumber Nayu II RT 05/XII Kadapiro, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : II
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : PDI Perjuangan
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 1,985
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :



Nama : **SUPRIYANTO**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 25 September 1968
 Alamat Tempat Tinggal : Sumber RT 03/XII, Banjarsari, Solo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Kristen
 Status Perkawinan : Kawin
 Anggota Komisi : III
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Partai Politik : Partai Demokrat
 No. Urut Calon : 1
 Perolehan Suara : 1,247
 Hasil PAW / Bukan Hasil PAW : Bukan Hasil PAW
 Riwayat Organisasi :

NAMA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2004
DAERAH PEMILIHAN IV



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Rwayat Organisasi

Igo, EKO SUSANTO, Amd Kom
Kediri, 24 Oktober 1974
Jl. Krikatau No 4 Monegoro, Jebres Solo
Laki-laki
Kristen
Kawin
I
DIII
PDS
1
1.573
Bukan Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Rwayat Organisasi

EPI RIZANDI
Pading, 22 Agustus 1968
Jl. P. Sulaimi No 118
Laki-laki
Islam
Kawin
II
SLTA
PAN
2
780
Bukan Hasil PAW



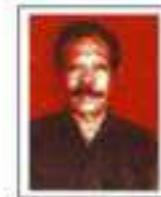
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Rwayat Organisasi

HONDA HENDARTO
Surakarta, 26 September 1962
Tegal Kuningan RT 01/08 Jebres, Solo
Laki-laki
Katholik
Kawin
II
SLTA
PDI Perjuangan
4
4.248
Bukan Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Rwayat Organisasi

JAMES AGUST PATTIWAEI
Surakarta, 14 Agustus 1962
Jl. Arlin No. 21 Kapatihan Kulon, Jebres.
Laki-laki
Kristen
Kawin
II
SLTA
PDI Perjuangan
3
1.129
Bukan Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Rwayat Organisasi

Igo, JUNI WAHYONO
Surakarta, 26 Juni 1947
Pucangsawit RT 02/0C, Jebres Solo
Laki-laki
Katholik
Kawin
Sekretaris Komisi IV
SLTA
PDI Perjuangan
5
521
Bukan Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Rwayat Organisasi

Drs. MUHAMMAD ASMAUN
Surakarta, 21 Maret 1951
Jl. RE Martadinata No 312 Solo
Laki-laki
Islam
Kawin
II
Sarjana (S1)
PAN
1
941
Bukan Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

H. MUBARRID FODH
 Sukoharjo, 4 Juli 1961
 Jl. P. Sultan Dj. Masjid No. 7, Jabbe, Solo
 Laki-laki
 Islam
 Kawin
 I
 Sarjana STK
 PKS
 1
 2.700
 Bukan Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

YF SOEKASNO
 Sukoharjo, 1 November 1959
 Bangunharjo RT 03/IX Gendekot, Solo
 Laki-laki
 Katolik
 Kawin
 II
 SLTA
 PDI Perjuangan
 7
 1.917
 Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

H. BURTO N. SUSARNO ST
 Sukoharjo, 5 Juni 1940
 Jl. Kemandi 100 Rejowinangun, Solo
 Laki-laki
 Islam
 Kawin
 I
 STB
 Partai Golkar
 1
 901
 Bukan Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

YULIANTO
 Sukoharjo, Juli 1964
 Sidorejo RT 04/IX, Jabbe, Solo
 Laki-laki
 Islam
 Kawin
 I
 SLTA
 PDI Perjuangan
 2
 1.140
 Bukan Hasil PAW

NAMA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2009
DAERAH PEMILIHAN II



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwayat Organisasi

ABDULLH A. ASSEGAFF
Surakarta / 8 Nopember 1963
Makodranan RT 01/04 Pasoknayan, Solo
Laki-laki
Islam
Kawin
DUTA
Partai Hanura
1
1812
Bukan Hasil PAM
1. Wk. Bend. DPD PAN Ska. (2000-2005)
2. Wk. Kat. (D.K.) DPD PAN (2005-2010)
3. Kat. Frak PAN DPRD Ska. (2004-2008)
4. Kat. Bd. Kehorek DPRD (2005-2010)
5. Wk. Sak. ME PDD Ska. (2005-2010)
6. Sak. DPC Partai Hanura Surakarta



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwayat Organisasi
sah

H. HAM MULIANDRI SYAH, S.Ag
Surakarta / 11 September 1966
Jl. Tuntunan 1 No. 136 Erlawan, Solo
Laki-laki
Islam
Kawin
Sarjana Agama (S)
PAS
1
1.250
Bukan Hasil PAM
1. Ketua FAL (1995)
2. Agt. (DM) (2008)
3. Ketua DP RT PAN Kodang Lumbu (1998)
4. Wk. Kat. DPD PAN Ska (2000-2005)
5. Ketua DPD PAN Ska (2005-2010)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwayat Organisasi

HERLAN PURNANTO, BA
Surakarta / 17 Juli 1988
Dempangan Dg. Cempaka 8 No 25 Demangan
Laki-laki
Islam
Kawin
Diploma 3 (D3)
Partai Demokrat
2
1.281
Bukan Hasil PAM
1. Ketua PMP SBY
2. Ketua Suara Bangsa Tingkat Kota Surakarta



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwayat Organisasi

M. KUSUMAHARDJO
Surakarta / 7 Desember 1945
Jl. Gajah Suroto 7 Cakikan Prokembangan, Solo
Laki-laki
Islam
Kawin
DUTA
Partai Golkar
1
1.158
Bukan Hasil PAM
1. Bend. DPD PAN Ska. (1980-1985)
2. Wk. Kat. DPD KIPJ Jalang (1982-1988)
3. Bend. Pemuda Golkar Kab Sukoharjo (80-88)
4. Pimpinan Partai Golkar Kab Pasarlaman 98-00
5. Wk. Ketua DPD Partai Golkar Ska (2002-2004)
6. Ketua PD. AMPD Ska (2000-2004)
7. Kat. DPD Partai Golkar Ska (2004-2009)
8. Kat. PD AMPD Ska (2004-2007)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwayat Organisasi

MARHEN
Surakarta / 7 April 1965
KusumaEgung RT 01/01 Joyosuma Solo
Perempuan
Islam
Kawin
DUTA
PCI Perjuangan
5
2.480
Bukan Hasil PAM
-



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwayat Organisasi

Drs. PAULUS HARYOTO
Klaten / 27 Desember 1953
Dawung Wilan Rt 02/14 Dehukutaman, Solo
Laki-laki
Katolik
Kawin
Sarjana (S1)
PCI Perjuangan
8
2.757
Bukan Hasil PAM
-

NAMA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2009
DAERAH PEMILIHAN III



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

Digi Ing H. QUATLY A. ALKATHIR
: Surakarta / 10 Desember 1965
: Jl. Dwidanar No 2 RT 0011 Paksihewan Solo
: Laki-laki
: Islam
: Kawin
:
: DB
: PKO
: 1
: 1,740
: Bukan Hasil PAW
: 1. Ketua PPMO (1984-1987)
: 2. Wakil DPRN PTME - Jember (1998-1999)
: 3. Panitia Nasional Indo-Jerman (1997-2001)
: 4. Ketua Park Kesehatan Se Eropa (1999-2000)
: 5. Ketua PKO Solo (2002-2008)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

ANNA BUDARTI, S.Pd
: Surakarta / 25 Oktober 1966
: Tegayutan Rt 0010 Klatikan, Boyomartani
: Perempuan
: Kristen
: Kawin
:
: Sarjana (S1)
: PDS
: 1
: 1,219
: Bukan Hasil PAW
: 1. CSR SMA Widya Nusantara
: 2. Komisi Remaja & CPU Widyayudha



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

RENE WIDYAWATI, SE
: Surakarta / 13 September 1975
: Singosaren Rt 02/02, Kertayan Sekegen Solo
: Perempuan
: Islam
: Kawin
:
: Sarjana Ekonomi (SE)
: Partai Demokrat
: 1
: 2,160
: Bukan Hasil PAW
: 1. Sek. Sekur. ANPAR Sahid, Jakarta (2006)
: 2. Wakil Sek. 1 DPC Partai Demokrat (2003-2007)
: 3. Wakil. PF DPC Partai Demokrat (2007-2013)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

ASH SUDICHO PUTRO, S.S
: Boyongan / 14 Agustus 1971
: Boyongan Rt 01/01 Nukler Boyongan
: Laki-laki
: Islam
: Kawin
:
: Sarjana (S1)
: PKO
: 2
: 809
: Bukan Hasil PAW
: 1. Senat Mahasiswa FT UNS (1993)
: 2. HMI FT UNS (1992)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

WELLY TANDIO WIRONO, SH
: Surakarta / 31 Agustus 1940
: Jl. Ronggonalito No 44 RT 03/03 Kemplung
: Laki-laki
: Kristen
: Kawin
:
: Sarjana Hukum (SH)
: PDI Perjuangan
: 66
: 3,360
: Bukan Hasil PAW
: 1. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

BAMBANG WIJAYANTO, SH
: Surakarta / 25 November 1952
: Jl. Rula Tengan II No. 15, RT 05/VI Sumber
: Laki-laki
: Katolik
: Kawin
:
: Sarjana Hukum (SH)
: PDI Perjuangan
: 1
: 1,200
: Bukan Hasil PAW
: 1. Ketua PDI (1982 - 1987)
: 2. Ketua PAC PDI Perjuangan (1987-2007)
: 3. DPC PDI Perjuangan Surakarta (2008-2018) Wind



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Pencalonan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwaja Organisasi

KLODY PURNOMO, SM
Sukoharjo, 28 September 1970
Jl. Satrio 4 Gedung RT 01 RW 02 Keresan
Laki-laki
Islam
Kawin
Sarjana Hukum (S1)
PAN
5
502
Bukan Hasil PAM
1. Ibtih - Ibtih N. Muband - Sbu 2004
2. Pendidikan Perilaku (2003-2005)
3. KOP 100 Kaderan - Sbu (2002-Sekarang)
4. Sbu Advokat KAPPROG
5. Bend. PKM (Banjaron)
6. Bend. DMC Paksi Banjarnesi
7. Dewan LHM KOP Muhammadiyah
8. Bend. Muka Wakil din DB Muhammadiyah



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Pencalonan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwaja Organisasi

HONDA HINGMOTO
Sukoharjo, 26 September 1983
Tegal Kuningan RT 01 / 26 Jabres
Laki-laki
Katholik
Kawin
SLTA
PCI Perjuangan
3
6328
Bukan Hasil PAM
1. Ket. Rading PDP Klat. Jabres D
2. Ketua LPMN Klat. Jabres



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Pencalonan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwaja Organisasi

HARTATI, SE
Klaten, 17 Mei 1971
Bawono Rt 03 / V Nusukan, Banjarnesi Solo
Perempuan
Islam
Kawin
Sarjana Ekonomi (S1)
PDI Perjuangan
3
4.111
Bukan Hasil PAM
1. Anggota Dmas DMC Solo Raya



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Pencalonan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwaja Organisasi

HJ. SYARINGENH
Sukoharjo, 14 April 1955
Jl. Jawa No. 02 Rt. 04 / 4 Timurin Banjarnesi
Perempuan
Islam
Kawin
SLTA
Parti Hanura
2
1.510
Bukan Hasil PAM
1. Ket. Dharma Wicak Persewaan Semaedi
Klat. Sugan (2006-2007)
2. Ketua Bc. Hmas dan Dharma
Yayasan Al Khair Sukoharjo (2007)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Pencalonan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwaja Organisasi

Drs. HERY JUMADI
Sukoharjo, 1 Desember 1989
Jagalan Rt 07 / IV Jabres, Solo
Laki-laki
Islam
Kawin
Sarjana Sastra (S1)
PDI Perjuangan
3
2.332
Bukan Hasil PAM
1. Pengurus Karang Taruna
2. Pengurus LPMK
3. Pengurus Muhammadiyah



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Pencalonan Suara
Hasil PAM / Bukan Hasil PAM
Rwaja Organisasi

MARYUDONO, SH
Sukoharjo, 18 April 1967
Kopriban Rt 06 / V Banjarnesi Solo
Laki-laki
Islam
Kawin
Sarjana Hukum (S1)
PDI Perjuangan
3
3.279
Bukan Hasil PAM
1. Pengurus Rading PDI Perjuangan Solo
2. Pengurus PAC Banjarnesi Solo
3. Pengurus DPC PDP Kota Sukoharjo



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

H. MUBAND RODO
: Surakarta 14 Juli 1981
: J. Ir. Suami Gg. Kedu, No 7 Patihan Jebres
: Laki-laki
: Islam
: Kawin
:
: Sarjana Teknik Elektro (S1)
: PKS
: I
: 1.500
: Bukan Hasil PAW
: 1. MKU Ska. (2008-2013)
: 2. PPEU MUI Surakarta (2002-Sekarang)
: 3. KAL. PM. Jabres. Ska. (2002-Sekarang)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

SONI WARISTO
: Surakarta 12 Juli 1972
: Dabegan Rt. 04/B Mojolongo Jabres Solo
: Laki-laki
: Islam
: Kawin
:
: Diploma 3 (D3)
: PDI Perjuangan
: 4
: 2.400
: Bukan Hasil PAW
: 1. Pengurus RW
: 2. Pengurus LPMK



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

KRBH SATRIYO HADINAGORO
: Surakarta, 10 April 1946
: Baluwati RT 011 Patokloran Solo
: Laki-laki
: Islam
: Kawin
: II
: SLTA
: PDI Perjuangan
: I
: 2.234
: Hasil PAW



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Tempat Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

SUPRIYANTO
: Surakarta
: 25 September 1968
: Sumber RT 03001, Banjarsari, Solo
: Laki-laki
: Kristen
: Kawin
:
: SLTA
: Partai Demokrat
: I
: 2.240
: Bukan Hasil PAW
: 1. Wk. Kat. DPC P. Demokrat (1995-Sekarang)
: 2. Kat. DPAC P. Demokrat Kec. Banjarsari
: Kota Surakarta (2003-2007)
: 3. Wk. Kat. / DPC P. Demokrat Ska. (2006-2007)
: 4. Saklat. DPC P. Demokrat (2007-Sekarang)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

MENDITA WINDA BRITO, SH
: Klaten, 17 Maret 1982
: J. Mangrove No. 12, Rt. 01/W. Tegayuhana
: Laki-laki
: Islam
: Kawin
:
: Sarjana Hukum (S1)
: Partai Demokrat
: 4
: 728
: Bukan Hasil PAW
: 1. Ketua AMP Ggo Payer Tegayuhana (1987-1990)
: 2. Anggota KWP Klaten Ska.
: 3. Ketua Karang Taruna Tegayuhana, Jabres (2010-2012)
: 4. Sek. 1. PPKK. Klaten (2007-2011)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi

SURANTO, SE
: Surakarta 29 Maret 1968
: Tegayuhana Rt. 02/1/W, Jabres, Solo
: Laki-laki
: Kristen
: Kawin
:
: Sarjana Ekonomi (S1)
: Partai Demokrat
: 3
: 828
: Bukan Hasil PAW
: 1. Wk. Sek. 1. DPAC Jabres
: 2. Kat. DPAC Jabres Ska. (2007-2013)
: 3. Kat. Kelompok Karuh D. P. (1980-1999)
: 4. Kat. Unit Leader DPA (2000-2010)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi
lain

SWATIMSWATI
Surabaya / 12 Agustus 1949
Diponegoro Rt 02 / 11, Kemlayan, Sido
Pondokpin
Kecamatan
Kawali
SLTA
FOS
1
1.001
Bukan Hasil PAW
1.PMS
2.MU Unwan Persekitas Indonesia
3.Pangurus Rumah Rawan Bukit Hormon



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi
lain

Dra. WAHYUNING CHUMASON,
Surabaya / 17 Januari 1967
Jl. Poda 83 Tapan Nuriat
Pawangan
Islam
Kawin
Pasca Sarjana (S2)
Partai Demokrat
3
1.308
Bukan Hasil PAW
1.Kat.Karang Taruna (1987)
2.Wk.Kat. MAPA FOSP Unari (1998)
3.Sek. SBM FOSP Unari (1987)
4.Biro. GAN/SRI (2003)
5.Humas GAN/SRI (2005)
6.Wk. Kat. 1 DPC Partai Demokrat (2007)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi
lain

YF Soekasno, S.Sos
Marebo / 28 Oktober 1959
Jl. Kuning MDS Rt 01/VI Mardhan Sabo
Pawangan
Islam
Kawin
Sarjana Sosial (S1)
Partai Gerindra
1
648
Bukan Hasil PAW
1. Anggota HM Ska
2. Anggota HPP Ska
3. Wk Kat. No Perencanaan Partai Hanas



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi
lain

YF SOEKASNO
Surabaya / 1 November 1959
Bangunwato RT 03X Gandekan Jabres
Laki-laki
Katholik
Kawin
SLTA
PDI Perjuangan
2
4.117
Bukan Hasil PAW
1.Pengurus Panitia PDP
Kat. Jabres (1995 - 2000)
2. Pengurus PAC PDIP Kat. Jabres
2002 - 2009
3. DPC PDIP Surakarta (2005-2011)



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi
lain

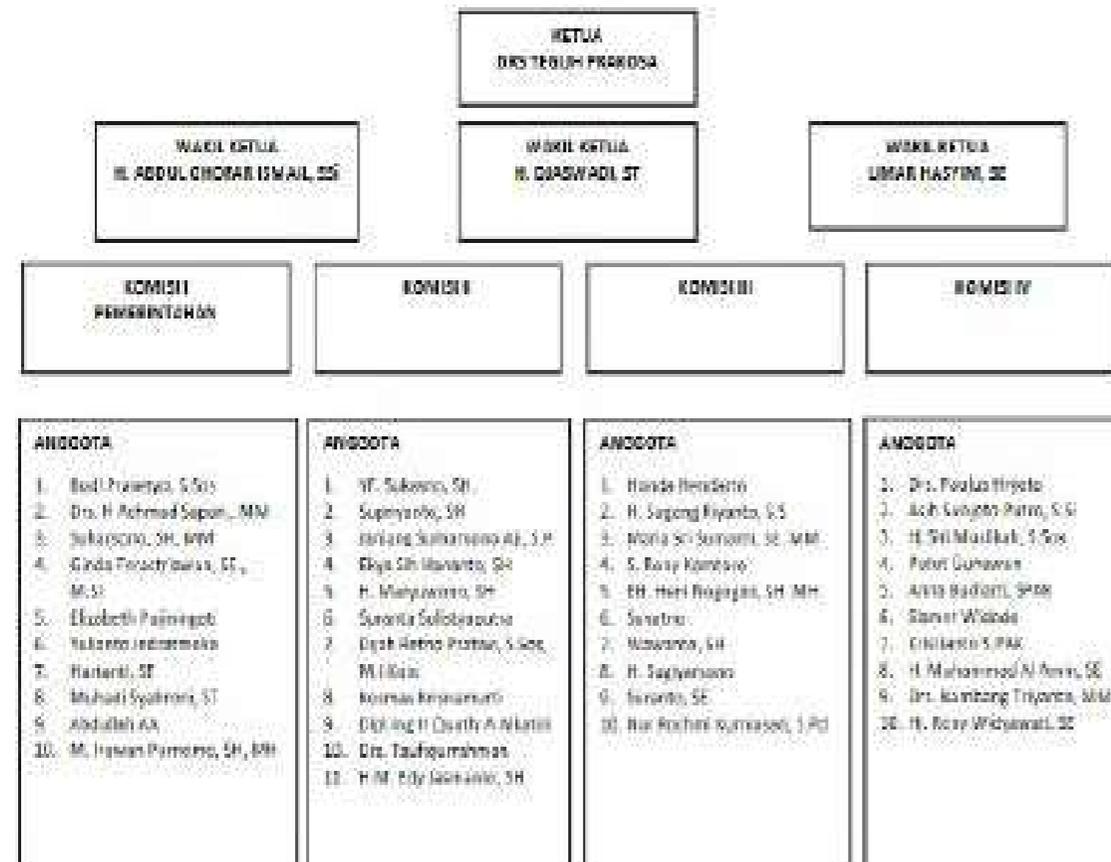
UMAR HASYIM, SE
Klaten / 18 Agustus 1957
Jl. Kapan Mulyad No 150 RT 01/VI Pasakihwon
Laki-laki
Islam
Kawin
Sarjana Ekonomi (S1)
PAN
5
1.205
Bukan Hasil PAW
1. Kat. Pemuda Muhammadiyah Surakarta
2. Kat. Depk. Pengomb. SOM & Perdesaan
PWPW Jawa Tengah
3. Kat. Depk. Pengomb. SOM dan Perdesaan PP
Remuda Muhammadiyah
4. Kat. DPD PAN Ska (2000-2005)
5. Wk. Sek. HPP MUA Ska
6. Wk. Sek. DPW PAN Jawa Tengah
7. Wk. Kat. Dewan Masjid Jawa Tengah



Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Anggota Komisi
Pendidikan Terakhir
Partai Politik
No. Urut Calon
Perolehan Suara
Hasil PAW / Bukan Hasil PAW
Riwayat Organisasi
lain

YULIANTO INPRATNO
Surabaya / 13 Juli 1984
Sidorejo RT 04X Moponggo Jabres
Laki-laki
Islam
Kawin
SLTA
PDI Perjuangan
13
2.444
Bukan Hasil PAW
1. Kat. Kepemudaan KCPRI Surakarta

NAMA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN



PANITIA WUJUDBAH		POKTES BANGGARAN	
1. Drs. Marno D.	10. Letkol Inf Suprianto	1. Drs. Marno D.	10. Dika Trisnowidodo
2. Letkol CA/MT H. Murtahar	11. Letkol. Muz Soyo	2. Letkol CA/MT H. Murtahar	11. Dr. Dendang Dyaningrum
3. FM. Makso Sumarno, SH	12. Letkol. Auli Rahaga	3. FM. Mulyo Samiryo, SH	12. Drs. Anis Mulyandari
4. H. Haryanto H. Iqo	13. Drs. H. Damana	4. M. Wiryosuman Hedi	13. H. Makso Muzik, SH
5. Serdjan Dhyandjaja	14. Drs. H. Daryono	5. Letkol. Adm. Soesandar	14. H. Achmad Wahid, SH
6. Iqbalul Somayanto	15. Tji Pujiyati Priadi, SH	6. Letkol. Per. Soepanggulsi	15. Serdit Suno cenan
7. Mohamad Sulhono	16. Drs. I. Sorwono	7. Letkol. Sp.L.J. Rendi	16. H. Anipus Soewoto
8. Ny. H. Sri Zukhras, SH	17. Sekardi Samudrarajaga	8. Mulyanto	17. Mohammad Ashari
9. Abu Nurin		9. Dika Trisnowidodo, SH	

